

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

**(Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
di SAMSAT Kota Yogyakarta)**



SKRIPSI

Oleh:

Nama : Firman Adi Nugroho

No. Mahasiswa : 14312277

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2019

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
di SAMSAT Kota Yogyakarta)**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama : Firman Adi Nugroho

No. Mahasiswa : 14312277

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2019

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 15 April 2019

Pemulis
METERAI
TEMPEL
TGL
45AB3APF466712358
6000
ENAM RIBURUPIAH
(Firman Adi Nugroho)



HALAMAN PENGESAHAN

**Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak
Kendaraan Bermotor**

**(Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota
Yogyakarta)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama : Firman Adi Nugroho

No. Mahasiswa : 14312277

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal ... 10 April 2014 ...

Dosen Pembimbing,



Mahmudi, S.E., M.Si., Dr

Acc dt.
Soji

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR (STUDI PADA WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI
SAMSAT KOTA YOGYARTA)

Disusun Oleh : FIRMAN ADI NUGROHO

Nomor Mahasiswa : 14312277

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

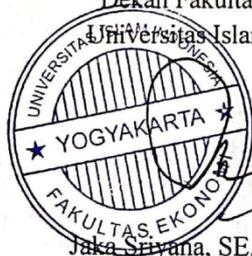
Pada hari Selasa, tanggal: 7 Mei 2019

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Mahmudi, Dr., SE., M.Si, Ak, CMA.

Penguji : Isti Rahayu, Dra., M.Si, Ak, Cert, SAP

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Yogyakarta)”. Penelitian ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yaitu skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program Strata 1 (S1) pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyak mengalami kendala, namun dengan bantuan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak maka skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya.
2. Nabi Muhammad, Rasulullah SAW yang telah memberikan ilmu serta syafaatnya.
3. Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

5. Bapak Mahmudi, S.E., M.Si., Dr selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
7. Seluruh karyawan dan staf Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
8. Kedua Orangtua dan saudara laki-laki penulis Bapak Sukiran dan Ibu Nirbayati serta Kakak Nur Rochman yang selalu memberikan doa dan semangat kesuksesan penulis.
9. Semua keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang selalu memberikan motivasi dan dukungan agar penulis dapat segera menyelesaikan skripsinya.
10. Teruntuk Kantor SAMSAT Yogyakarta terima kasih telah membantu memberikan tempat untuk penulis menyebarkan kuesioner.
11. Teruntuk teman-teman Akuntansi 2014 terima kasih telah memberikan kenangan, pengalaman, pembelajaran, serta bantuan kepada penulis. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Sehingga penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis

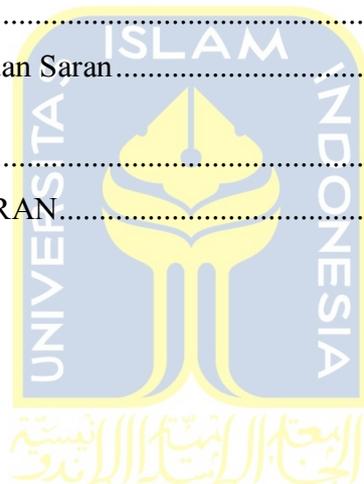
(Firman Adi Nugroho)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN BERITA ACARA.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.2 Pengembangan Hipotesis.....	24
2.3 Penelitian Terdahulu	29
2.4 Kerangka Pemikiran.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian (Kantor Pelayanan Pajak Daerah atau Samsat Kota Yogyakarta).....	32
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian.....	36
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	38
3.4 Variabel Penelitian.....	38

3.4.1	Kepatuhan Pajak.....	39
3.4.2	Kesadaran Pajak.....	39
3.4.3	Kualitas Pelayanan.....	40
3.4.4	Penerapan E-Samsat.....	40
3.4.5	Pengetahuan Pajak.....	41
3.4.6	Sanksi Pajak.....	42
3.5	Teknik Analisis Data.....	43
3.5.1	Analisis Statistika Deskriptif.....	43
3.6	Uji Kualitas Data.....	43
3.6.1	Uji Validitas.....	43
3.6.2	Uji Reliabilitas.....	44
3.7	Uji Asumsi Klasik.....	44
3.7.1	Uji Normalitas.....	44
3.7.2	Uji Multikolinearitas.....	45
3.7.3	Uji Heterokedastisitas.....	45
3.7.4	Koefisien Determinasi.....	45
3.8	Analisis Regresi Berganda.....	46
3.8.1	Uji t.....	47
3.9	Hipotesa Operasional.....	47
3.9.1	Kesadaran Pajak.....	47
3.9.2	Kualitas Pelayanan.....	48
3.9.3	Penerapan E-Samsat.....	48
3.9.4	Pengetahuan Pajak.....	48
3.9.5	Sanksi Pajak.....	48
BAB IV PEMBAHASAN.....		49
4.1	Karakteristik Responden.....	49
4.1.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	49
4.1.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	50
4.1.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	51
4.1.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	51
4.2	Analisis Statistika Deskriptif.....	52

4.3	Uji Validitas	55
4.4	Uji Reliabilitas	57
4.5	Uji Asumsi Klasik.....	58
4.5.1	Uji Normalitas	58
4.5.2	Uji Multikolinearitas.....	59
4.5.3	Uji Heterokedastisitas	61
4.5.4	Koefisien Determinasi.....	62
4.6	Analisis Regresi Linear Berganda	63
4.6.1	Uji t	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		72
5.1	Kesimpulan	72
5.2	Keterbatasan dan Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA		74
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....		78



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3.1 Data Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Yogyakarta Tahun 2017	37
Tabel 4.1 Presentase Jenis Kelamin	49
Tabel 4.2 Presentase Usia Responden	50
Tabel 4.3 Presentase Jenis Pekerjaan Responden	51
Tabel 4.4 Presentase Pendidikan Terakhir Responden	51
Tabel 4.5 Descriptive Statistic	52
Tabel 4.6 Uji Validitas	55
Tabel 4.7 Uji Reliabilitas	58
Tabel 4.8 Uji Normalitas	59
Tabel 4.9 Uji Multikolinearitas	60
Tabel 4.10 Uji Heteroskedastisitas	61
Tabel 4.11 Koefisien Determinasi	62
Tabel 4.12 Analisis Regresi Linear Berganda	63
Tabel 4.13 Uji t	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	31
------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

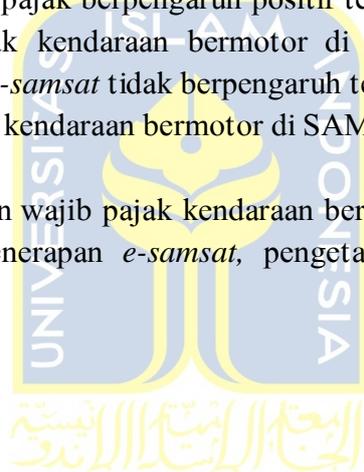
Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian	78
Lampiran 2 Kuesioner	79
Lampiran 3 Hasil Kuesioner	84
Lampiran 4 Data Responden	96
Lampiran 5 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	98
Lampiran 6 Hasil Uji Validitas	99
Lampiran 7 Hasil Uji Reabilitas	102
Lampiran 8 Hasil Uji Normalitas	103
Lampiran 9 Hasil Uji Multikolinieritas	103
Lampiran 10 Hasil Uji Heteroskedastisitas	103
Lampiran 11. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda	104
Lampiran 12 Hasil Uji t	104



ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, penerapan *e-samsat*, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Yogyakarta. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dengan penentuan sampel adalah metode *convenience sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner. Terdapat beberapa metode penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian ini di antaranya adalah analisis statistika deskriptif, uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas), analisis regresi berganda, dan uji t. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Yogyakarta. Sedangkan penerapan *e-samsat* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Yogyakarta.

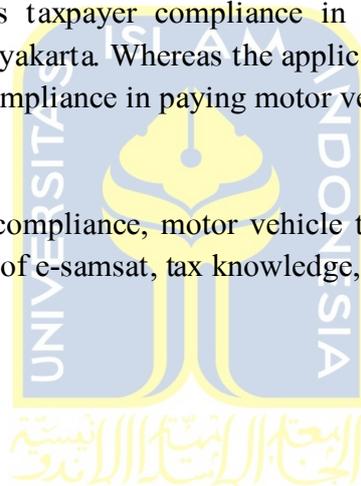
Kata Kunci: kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, penerapan *e-samsat*, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak.



ABSTRACT

The purpose of the study was to obtain evidences of the influence of the taxpayer awareness, quality of service, the application of e-samsat, tax knowledge, and tax penalty towards the taxpayer compliance in paying motor vehicle tax in SAMSAT of Kota Yogyakarta. The number of samples employed in the study was 100 respondents through the sample determination method of convenience sampling. Data collection was carried out through the questionnaire. There were several research methods used to achieve the objectives of the study, namely descriptive statistics analysis, validity test, reliability test, classic assumption test (normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test), multiple regression analysis, and t-test. The results of the study showed that the taxpayer awareness, quality of service, tax knowledge, and tax penalty give the positive effect towards taxpayer compliance in paying motor vehicle tax in SAMSAT of Kota Yogyakarta. Whereas the application of e-samsat has no effect against the tax payer compliance in paying motor vehicle tax in SAMSAT of Kota Yogyakarta.

Key words: taxpayer compliance, motor vehicle taxpayer awareness, quality of service, the application of e-samsat, tax knowledge, and tax penalties.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang pelaksanaan pembangunan dan perekonomian nasional bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Perekonomian suatu negara tidak akan pernah lepas dari kebijakan dan permasalahan ekonomi mikro maupun ekonomi makro yang dilakukan oleh suatu negara. Indonesia adalah negara berkembang di mana banyak sekali kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah berkaitan dengan banyaknya permasalahan yang dihadapi negara tersebut. Suatu Negara membutuhkan dana untuk membiayai segala kegiatan yang dilakukannya baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemerintah daerah sekaligus pemerintah pusat bertanggung jawab atas segala kebijakan, perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaan pajak. Salah satu pemasukan suatu negara berasal dari sektor pajak.

Pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Pajak adalah pungutan terhadap masyarakat oleh negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa, dan terutang yang wajib dibayar dengan tidak mendapat imbalan secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Siahaan, 2013).

Ada 2 sumber pendapatan yang dimiliki oleh Negara Indonesia, yaitu yang pertama adalah pajak dan yang kedua adalah PNB (penerimaan negara bukan pajak). Pajak dibedakan menjadi dua yaitu, pajak pusat dan pajak daerah, pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan di segala aspek bidang.

Pajak juga merupakan sumber pendapatan nasional yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara Indonesia. Pajak sendiri mempunyai peran vital bagi negara untuk pertumbuhan dan pembangunan, semakin banyak wajib pajak yang membayar pajak semakin banyak juga pendapatan pajak yang diperoleh untuk membangun pertumbuhan dan pembangunan infrastruktur. Menurut UU No. 28 Tahun 2009, pajak daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah di Indonesia dapat digolongkan berdasarkan tingkatan pemerintah daerah, yaitu pajak daerah tingkat provinsi dan pajak daerah tingkat kabupaten/kota. Penggolongan pajak diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dalam undang – undang No 34 tahun 2000. Manfaat pajak sendiri tidak bisa secara langsung dirasakan oleh rakyat karena manfaat pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan kepentingan pribadi.

Rakyat tidak bisa merasakan hasil dari pengeluaran yang mereka keluarkan untuk pajak. Padahal penerimaan pajak setiap tahunnya selalu bertambah tetapi bentuk pengeluaran dari hasil penerimaan pajak yang dilakukan

pemerintah selanjutnya tidak bisa dirasakan seluruhnya oleh rakyat. Seperti yang kita tahu, permasalahan pajak kendaraan bermotor di negeri ini sangatlah banyak, dimulai dari permasalahan tidak membayar pajak maka nomor plat kendaraan bermotor akan diblokir, para penunggak pajak diminta melunasi pembayaran pajak di lokasi razia atau membuat perjanjian pelunasan. Selain itu juga terdapat permasalahan lain dari pajak kendaraan bermotor yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor. Masyarakat berpikir membayar pajak kendaraan bermotor terlalu rumit dan lama banyak prosedur yang dilakukan. Padahal faktanya prosedur tersebut dinilai cukup simple yaitu dengan mengisi formulir disertai lampiran berkas-berkas lalu memberikannya ke loket maka pembayar pajak akan menerima slip pembayaran dan selesai membayar pembayar pajak akan menerima bukti pembayaran yang akan digunakan dalam mengambil STNK. Pemerintah diharapkan berupaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNKB) yang merupakan salah sumber pendapatan pajak yang digunakan untuk pembangunan dan pertumbuhan pemerintah daerah (Dharma & Suardana, 2014) Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB merupakan salah satu Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah tak terkecuali di Provinsi Daerah Yogyakarta terutama di Kota Yogyakarta. Pajak Kendaraan Bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diatur dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yaitu “Dengan peraturan daerah ini menetapkan pungutan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan

bermotor. Pada tahun 2016, pendapatan asli daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta berasal dari pajak kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan DIY dapat merealisasikan pendapatan dari penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar 600 miliar (Wikanto, 2017)

Tingkat kepatuhan dari seorang wajib pajak sangatlah penting karena dari kepatuhan tersebut tujuan dari penerimaan pajak akan tercapai. Faktor-faktor yang meningkatkan kepatuhan wajib pajak diantaranya, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Penerapan E-Samsat, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan. Menurut Kepatuhan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari: “Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir, dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal tersebut wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

Pajak Kendaraan Bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diatur dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yaitu “Dengan peraturan daerah ini menetapkan pungutan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.” Objek dari pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan

bermotor. Pajak kendaraan bermotor ini dikenakan berulang-ulang pada waktu tertentu (*periodik*) dan pajak ini di pungut setiap tahun.

Salah satu instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam hal mengurus penarikan pajak kendaraan bermotor adalah kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) yaitu suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung.

SAMSAT merupakan suatu sistem kerjasama dengan Polri, Dinas Pendapatan Provinsi dan PT Jasa Raharja dalam pelayanan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang dihubungkan dengan pemasukan kas negara melalui melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Dalam hal ini, Polri berfungsi dalam menerbitkan STNK, Dinas Pendapatan Provinsi berfungsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sedangkan PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Penulis mengambil judul tersebut karena tingkat jumlah kendaraan di Kota Yogyakarta yang semakin bertambah pesat yang berasal karena industri otomotif berlomba-lomba melakukan inovasi dalam menciptakan produk baru untuk bersaing dalam industri otomotif serta tingginya sifat wajib pajak yang terlalu konsumtif dalam memenuhi kebutuhan berkendara namun tidak diimbangi dengan kesadaran membayar pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian

sebelumnya yaitu sampel yang digunakan serta dengan menambah beberapa variabel yang dijadikan sebagai variabel independen.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”** (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Yogyakarta).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dibahas adalah:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah penerapan e-samsat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor?
5. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk

1. Menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

2. Menganalisis pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor.
3. Menganalisis pengaruh penerapan e-samsat terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor.
4. Menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor.
5. Menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Yogyakarta yaitu:

1. Bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Istimewah Yogyakarta dan bagi Kantor Samsat Kota Yogyakarta diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran serta masukan mengenai faktor-faktor yang berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Bagi peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian di bidang yang sama, diharapkan penelitian ini dapat memberikan bukti empiris dan

memberikan pengetahuan dalam pengembangan teori perpajakan dan akuntansi keperilakuan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran secara jelas dan menyeluruh terkait penulisan, maka penelitian ini disusun sebagai berikut

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah yang menjadi dasar pemikiran atau latar belakang penelitian ini untuk selanjutnya disusun rumusan masalah dan diuraikan tentang tujuan dan penelitian serta disusun sistematika penulisan di akhir.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini meliputi landasan teori yang menjadi dasar dari penelitian terdahulu yang dijadikan dasar dalam perumusan hipotesis dan analisis penelitian ini setelah itu diuraikan dan digambarkan kerangka pemikiran dari penelitian kemudian disebutkan di hipotesis yang ingin diuji dalam penelitian

BAB III : METODE PENELITIAN

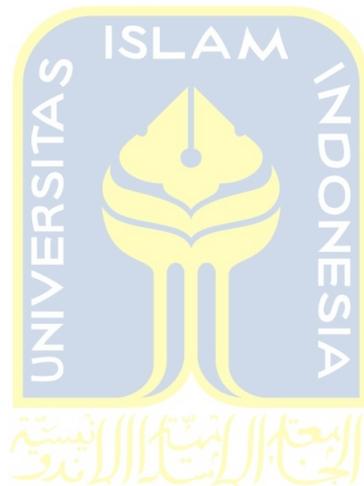
Bab ini menjelaskan mengenai bagaimana penelitian ini dilakukan secara operasional. Bab ini terdiri dari variabel yang dilakukan dalam penelitian ini serta definisi operasionalnya. Kemudian dijelaskan mengenai pengambilan keputusan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan serta metode pengambilan data dan diakhiri dengan alat analisis yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Bab ini membahas deskripsi hasil pengolahan data, pengujian hipotesis dan penjelasan yang mendukung dalam rangka pengambilan kesimpulan dalam penelitian. Setelah ini diuraikan mengenai analisa data dari perolehan penelitian yang dilakukan serta pembahasannya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup dan bagian akhir dari penelitian ini yang terdiri atas kesimpulan dari hasil penelitian, saran dan keterbatasan – keterbatasan dari hasil penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Atribusi adalah sebuah teori yang membahas tentang suatu perilaku seseorang dimana akan membentuk suatu kesan dalam pembentukan yang akan ditarik kesimpulan atas faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain.

Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins & Judge, 2008). Perilaku yang disebabkan oleh internal disebabkan perilaku yang diyakini berada dibawah kendali individu itu sendiri sedangkan perilaku yang disebabkan oleh eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar artinya individu terpaksa berperilaku karena lingkungan atau situasi. Teori atribusi sangat relevan dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini. Kepatuhan wajib pajak dikaitkan dalam sikap wajib pajak dalam menilai pajak itu sendiri sedangkan persepsi seseorang membuat penilaian mengenai orang lain yang sangat dipengaruhi oleh factor internal maupun factor eksternal orang lain tersebut (Jatmiko, 2006).

Penentuan faktor internal atau eksternal menurut (Robbins & Judge, 2008) tergantung pada tiga faktor yaitu:

1. Kekhususan (Kesendirian atau *Distinctiveness*)

Kekhususan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda-beda tergantung situasi yang berlainan. Apabila sikap tersebut dianggap hal yang tidak biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika itu dianggap hal yang biasa maka akan dinilai sebagai atribusi eksternal.

2. Konsensus

Konsensus artinya semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon sikap seseorang jika dalam situasi yang sama. Apabila konsensus tinggi maka termasuk atribusi eksternal, sebaliknya jika konsensus rendah maka termasuk atribusi internal.

3. Konsistensi

Konsistensi artinya seseorang menilai sikap-sikap orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Pada teori atribusi, faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak, hal itu disebabkan individu atau wajib pajak terpaksa berperilaku karena situasi atau lingkungan.

2.1.2 Theory of Planned Behaviour

Theory of planned behavior (teori perilaku terencana) merupakan pengembangan dari teori sebelumnya yaitu *theory of reasoned action* (teori tindakan beralasan) yang dikemukakan oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein.

Dalam *theory of reasoned action* (teori tindakan beralasan), dimana teori ini merupakan teori yang digunakan untuk memperkirakan tingkah laku seseorang. Dalam *theory of reasoned action* (teori tindakan beralasan) memiliki dua prediksi utama dalam menilai niat seseorang untuk berperilaku, yaitu *attitude toward the behavior* dan *subjective norm* (Ajzen, 1991). *Theory of planned behaviour* secara tidak langsung menunjukkan kemungkinan bahwa individu atau kelompok tidak secara penuh melakukan sikap dibawah kendali mereka, maka *control sikap* yang diperlukan untuk mengatasi sikap tersebut.

1. *Behavioral belief* yang memengaruhi *attitude toward behavior*. *Behavioral belief* adalah hal-hal yang diyakini individu mengenai sebuah perilaku dari segi positif dan negatif atau kecenderungan untuk bereaksi secara afektif terhadap suatu perilaku. Sedangkan *attitude toward behavior* yaitu sikap individu terhadap suatu perilaku diperoleh dari keyakinan terhadap konsekuensi yang ditimbulkan oleh perilaku tersebut.
2. *Normative belief* yang memengaruhi *subjective norms*. *Normative belief* adalah norma yang dibentuk orang-orang disekitar individu yang akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Sedangkan *subjective norms* didefinisikan sebagai adanya persepsi individu terhadap tekanan sosial yang ada untuk menunjukkan atau tidak suatu perilaku.
3. *Control belief* yang memengaruhi *perceived behavior control*. *Control belief* adalah pengalaman pribadi, atau orang disekitar akan mempengaruhi pengambilan keputusan individu. *Perceived behavioral control* adalah

keyakinan bahwa individu pernah melaksanakan atau tidak pernah melaksanakan perilaku tertentu.

2.1.3 Teori *Technology Acceptance Model* (TAM)

Technology Acceptance Model ini merupakan teori yang digunakan untuk melihat bagaimana suatu sistem teknologi dapat mempengaruhi pemakai dari teknologi pada kegiatan sehari-hari masyarakat. Pemakai teknologi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sedangkan, penerapan sistem teknologinya yaitu e-samsat atau elektronik samsat.

2.1.4 Pengertian Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah iuran wajib yang dilaksanakan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut beberapa ahli yang dikutip dari (Resmi, 2017) ada beberapa pengertian pajak adalah sebagai berikut:

- a. Prof Dr. Rochmat Soemitro, S.H. menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Yang kemudian disempurnakan menjadi.

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk public serving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.”

- b. Dr. N. J. Feldman mengatakan bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan oleh sepihak dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya timbal balik, dan hanya digunakan untuk menutup pengeluaran umum.

Menurut (Resmi, 2017) beberapa definisi pajak dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak yaitu:

- a. Pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya timbal balik individual oleh pemerintah
- c. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
- d. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, dan jika pemasukannya surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

Pemberian kewenangan untuk mengadakan pemungutan pajak selain mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum, sebaiknya dipertimbangkan optimalisasi kepatuhan dalam membayar pajak. Untuk itu pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak harus tetap “menempatkan“ sesuai dengan fungsinya. Fungsi yang dimaksud menurut (Widyaningsih, 2011) dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (*budgeter*) yaitu sebagai sumber dana yang ditunjukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi Mengatur (*regulator*) yaitu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

3. Fungsi Stabilitas yaitu berhubungan dengan dengan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga melalui dana yang diperoleh dari pajak sehingga laju inflasi dapat dikendalikan.
4. Fungsi Redistribusi yaitu unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak.
5. Fungsi Demokrasi yaitu wujud sistem gotong royong yang dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang membayar pajak.

2.1.5 Pengelompokan Pajak

Dalam hukum berbagai perbedaan pajak terdapat berbagai jenis pajak, menurut (Mardiasmo, 2016) cara membedakannya dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu :

a. Menurut golongan :

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain.
- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

b. Menurut sifatnya :

- 1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
- 2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

c. Menurut lembaga pemungutannya:

- 1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- 2) Pajak daerah

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2009, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu :

1. Pajak Provinsi, terdiri dari :

- a) Pajak Kendaraan Bermotor
- b) Bea balik nama kendaraan bermotor
- c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d) Pajak air permukaan
- e) Pajak rokok

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari :

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Parkir
- g) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Menurut (Resmi, 2017), Pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga klasifikasi, yaitu:

1. Menurut Subjeknya

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang pembayarannya harus dilakukan oleh wajib pajak, tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak lain. Contohnya adalah Pajak Penghasilan
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembayarannya dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak lain, tidak harus dilakukan oleh wajib pajak. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai (PPN).

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau keadaan subyeknya, contohnya dalam pajak Penghasilan, tarif untuk wajib pajak yang telah menikah berbeda dengan wajib pajak yang belum menikah. Dan juga memperhatikan tanggungan anak dan tanggungan lainnya.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan objek pajak tanpa memperhatikan kondisi, benda, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi dari wajib pajak tersebut. Contohnya pajak bumi dan bangunan, pajak penjualan atas barang mewah dan pajak pertambahan nilai.

2.1.6 Kendaraan Bermotor

Pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu pajak daerah tingkat provinsi dan pajak daerah tingkat kabupaten/kota, jenis pajak tingkat provinsi salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor pajak kendaraan bermotor pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang pajak kendaraan bermotor, kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya, yang dioperasikan semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*). Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor adalah :

- 1) Kereta api.
- 2) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- 3) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.
- 4) Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor alat berat dan alat berat yang tidak digunakan sebagai alat angkutan orang atau barang di jalan umum. Selain

pengertian pajak kendaraan bermotor ada beberapa istilah teknis penting lainnya yang telah diatur pengertiannya dalam Undang-undang diantaranya :

- a. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di jalan umum, dan digerakkan oleh perangkat teknik berupa motor/peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan tidak termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar.
- b. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
- c. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- d. Jenis kendaraan bermotor adalah isi ruang yang berbentuk bulat terek pada mesin kendaraan bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin.
- e. Isi silinder adalah isi ruang yang berbentuk bulat terek pada mesin kendaraan bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin.
- f. Tenaga kuda (*horse power*) adalah ukuran daya kemampuan mesin.
- g. Tahun pembuatan adalah tahun perakitan.
- h. Nilai jual adalah nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.

- i. Peningkatan kendaraan bermotor yang selanjutnya peningkatan pajak kendaraan bermotor adalah tanda lunas pajak kendaraan bermotor.
- j. Tanda pelunasan dan pengesahan kendaraan bermotor (PPKB) adalah bukti pelunasan pembayaran pajak dan pengesahan kendaraan bermotor.
- k. Pemilik adalah hubungan hukum antara orang atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Sistem pemungutan pajak daerah yang digunakan dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor yaitu *Official Assessment System* yang didasarkan pada penetapan Kepala Daerah. Contohnya pembayaran pajak kendaraan bermotor di propinsi DIY adalah Dinas Pendapatan Daerah DIY melalui kantor bersama Sistem Administrasi Menunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) yang bekerjasama dengan kepolisian RI dan Asuransi Jasa Raharja.

2.1.7 Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011, yaitu

1. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :
 - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

2. Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
3. Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a dan angka (2), ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
4. Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (3), ditetapkan berdasarkan harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
5. Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada angka (4), adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
6. Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor :
 - a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
 - d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
 - e. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
 - f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan

- g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
7. Bobot sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b, dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut :
- a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
8. Bobot sebagaimana dimaksud pada angka (7), dihitung berdasarkan faktor-faktor :
- a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu / as, roda dan berat kendaraan bermotor;
 - b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan cirri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 (dua) tak atau 4 (empat) tak, dan isi silinder.
9. Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (1) sampai dengan angka (8), dinyatakan dalam

suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.

10. Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (9), ditinjau kembali setiap tahun.

2.1.8 Cara Perhitungan Pajak

Menurut Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011, Besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada dasar pengenaan pajak dengan penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (1) sampai dengan angka (8), dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan dan penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (9), ditinjau kembali setiap tahun.

2.1.9 Kepatuhan Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk dan patuh pada ajaran. Dalam perpajakan kita dapat memberikan pengertian bahwasanya kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan, sedangkan pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh negara kepada warga negaranya, berdasarkan undang-undang yang berlaku dimana atas pungutan tersebut negara tidak memberikan kontraprestasi secara langsung kepada si pembayar pajak. Pada penelitian ini, yang akan dibahas adalah kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak (*tax*

compliance) adalah bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukuman maupun administrasi (Gunadi, 2005)

2.2 Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib adalah kondisi dimana wajib pajak tersebut memahami dan melaksanakan aturan perpajakan dengan benar dan sukarela (Putri & Jati, 2012). Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Semakin masyarakat sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak akan berdampak positif terhadap penerimaan pajak, dan jika wajib pajak tidak memiliki kesadaran atau kewajiban perpajakannya maka akan berdampak terhadap berkurangnya penerimaan perpajakan yang diterima oleh negara.

Dalam kepatuhan wajib pajak, kesadaran merupakan hal yang paling menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi akan membayarkan pajaknya dengan sukarela dan tidak peduli tentang biaya pajak yang dikenakan. Selain itu wajib pajak akan menjadikan sanksi pajak sebagai pengingat agar tidak terlambat membayarkan pajaknya. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Wardani & Rumiya (2017) dan (Putri & Jati, 2012) membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

H1: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.2.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kualitas layanan merupakan selisih antara layanan yang dirasakan atau dipersepsikan oleh konsumen (persepsi) dengan layanan ideal yang diinginkan atau diminta oleh konsumen (harapan).

Kualitas layanan adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus. Secara sederhana definisi kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya. Pelayanan perpajakan dibentuk oleh dimensi kualitas sumber daya manusia (SDM), ketentuan perpajakan dan sistem informasi perpajakan.

Berdasarkan teori atribusi, kualitas pelayanan merupakan penyebab eksternal karena dilakukan oleh pihak aparat pajak sehingga dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membayar pajak. Pengaruh eksternal merupakan perilaku yang disebabkan oleh akibat dari sebab-sebab luar. Yang berarti semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas samsat, maka wajib pajak akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan sehingga wajib pajak akan cenderung patuh dalam membayar pajak. Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian pajak (Putri & Jati, 2012) yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

H2: Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.3 Pengaruh Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

E-samsat atau elektronik samsat adalah layanan pembayaran kendaraan bermotor yang dilakukan melalui e-banking atau ATM Bank yang telah ditentukan. E-samsat ini dapat memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor. Teori Technology Acceptance Model relevan untuk hipotesis ini. Penerapan e-samsat diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya sesuai dengan teknologi yang mereka gunakan sehari-hari. Semakin banyak yang menggunakan e-samsat, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Yolani, Djatikusuma, & Sugara, 2014) menyatakan bahwa pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui ATM berpengaruh terhadap kepuasan wajib pajak.

H3: Penerapan E-Samsat berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.2.4 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Fauzan (2017), pengetahuan pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Maka dengan meningkatnya pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan akan membuat wajib pajak menjadi patuh dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya mungkin orang

akan merasa ragu untuk membayar pajak. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak (Arum, 2012).

Teori atribusi menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak tentang peraturan pajak kendaraan bermotor merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membayar pajak. Jika wajib pajak memiliki pemahaman tentang perpajakan, wajib pajak menjadi lebih mengerti pentingnya membayar pajak dan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Dengan begitu tingkat kepatuhan pajak dapat meningkat. Fauzan (2017) dan Abdillah (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Melalui pendidikan formal dan non formal dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak, karena pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar harus dimiliki wajib pajak. Pada penelitian (Susilawati & Ketut, 2013) dan (Chusaeri, Daiana, & Afifudin, 2017) pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

H4: Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.2.5 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi adalah hukuman negatif yang diberikan kepada orang yang melanggar Peraturan (Ummah, 2015) Sanksi perpajakan menjadi suatu jaminan atau pencegahan (*preventif*) agar peraturan perpajakan yang sudah diatur dapat

ditaati dan tidak dilanggar oleh wajib pajak (Mardiasmo, 2011). Secara konvensional terdapat dua macam sanksi yaitu sanksi positif dan sanksi negatif. Sanksi positif merupakan suatu imbalan, sedangkan sanksi negatif merupakan suatu hukuman. Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka semakin merugikan wajib pajak.

Berdasarkan teori atribusi, sanksi pajak merupakan penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membayar pajak. Pengaruh eksternal tersebut dapat memaksa individu untuk melakukan perilaku karena situasi. Yang berarti wajib pajak mau membayar pajak karena merasa sanksi pajak akan memberatkan dalam membayar pajak. Jadi dengan begitu masyarakat akan lebih patuh dalam membayar pajak karena wajib pajak akan condong untuk menghindari sanksi pajak. Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian (Susilawati & Ketut, 2013) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

H5 : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

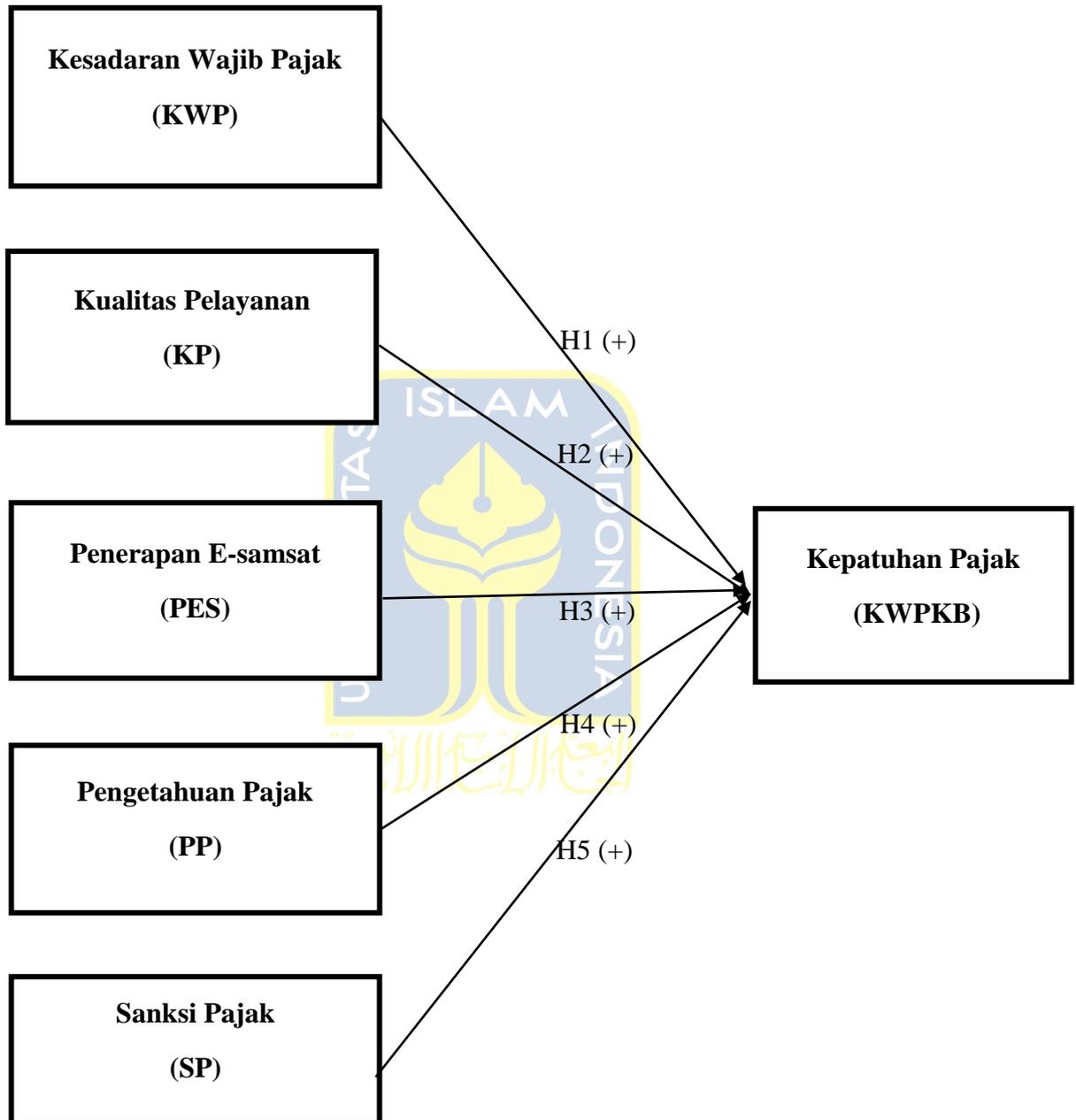
No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul	Hasil
1	Putri & Jati (2013)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar	Variabel kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar.
2	Susilawati & Budiarta (2013)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Singaraja.
3	Yolani, Djatikusuma, & Sugara (2014)	Pengaruh Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui ATM terhadap Kepuasan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang Menggunakan ATM	Penerapan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui ATM berpengaruh terhadap kepuasan wajib pajak kendaraan bermotor yang menggunakan ATM
4	Wardani & Rumiayatun (2017)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak dan sistem samsat drive thru berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul	Hasil
5	Chusaeri, Daiana, & Afifudin (2017)	Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan ditemukan tidak mengalami pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Batu. Variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan ditemukan tidak mengalami pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Batu.

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian teori dan diperkuat dengan penelitian terdahulu diduga bahwa Variabel Independen berpengaruh terhadap variabel Dependen. Dengan demikian dapat dirumuskan kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian (Kantor Pelayanan Pajak Daerah atau Samsat Kota Yogyakarta)

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau disebut SAMSAT dibentuk pada tahun 1976 dengan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yaitu Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Dalam operasionalisasi secara koordinatif dan integratif dilakukan oleh tiga instansi yaitu: Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), yang mempunyai fungsi dan kewenangan dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), di bidang pemungutan PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan (BBN-KB); PT Jasa Raharja (Persero), yang berwenang dibidang pemungutan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Oleh karena itu dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat untuk pengurusan registrasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak, dan SWDKLLJ, maka dibentuklah Kantor Bersama Samsat. Samsat Kota Yogyakarta terdiri dari tiga instansi yang masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a) Ditlantas Polda DIY bertanggung jawab terhadap registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, penerbitan STNK dan BPKB, pemeliharaan dan pengamanan rekaman dan atau berkas;

- b) DPPKA Provinsi DIY bertanggung jawab terhadap berjalannya prosedur dan persyaratan pemungutan PKB dan BBN-KB; dan
- c) Kantor Perwakilan PT Jasa Raharja (Persero) di Yogyakarta bertanggung jawab terhadap berjalannya pengutipan SWDKLLJ, Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum dan Pelayanan Klaim Asuransi Jasa Raharja.

Kantor Pelayanan Pajak Daerah / Samsat Kota Yogyakarta mempunyai fungsi sebagai pelaksana operasional pemungutan pajak daerah di daerah Kabupaten Kota Yogyakarta. Kewenangannya antara lain memungut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah.

Visi	Misi	Motto
Pelayanan secara professional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan kepada Wajib Pajak. 2. Meningkatkan kemampuan dan disiplin bagi petugas. 3. Meningkatkan pelayanan dalam registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. 4. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 	Kepuasan anda adalah kebahagiaan kami.

Kebijakan Mutu

Manajemen dan seluruh staf Samsat Kota Yogyakarta Bertekad memberikan kepuasan pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor

sebagai legalitas dokumen, meningkatkan PAD berdasarkan peraturan yang berlaku dengan disertai upaya perbaikan pelayanan secara terus menerus.

Fungsi Samsat Kota Yogyakarta

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program kantor;
2. Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), retribusi dan pendapatan lain-lain;
3. Pelaksanaan pendataan dan penetapan pajak daerah, retribusi, dan pendapatan lain-lain;
4. Pelaksanaan pelaporan dan penagihan pajak daerah, retribusi, dan pendapatan lain-lain;
5. Penyiapan bahan kebijakan penyelesaian sengketa pajak;
6. Pelaksanaan ketatausahaan;
7. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasab sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Lokasi Kantor Bersama Samsat Kota Yogyakarta berada di lingkungan Kantor Polda DIY. Kantor Bersama Samsat didirikan di atas tanah seluas 1512 m², dengan luas bangunan atau ruang utama 525 m², luas ruang pendukung 75 m², luas halaman parkir 800 m² dan luas fasilitas umum 112 m². Tipe Samsat Kota Yogyakarta sesuai dengan Surat Keputusan Tim Pembina Samsat Pusat

termasuk tipe A dengan jumlah pelayanan 751 sampai dengan 1000 obyek pajak per hari.

Bagian-bagian dari ruang utama Samsat Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan standar dalam Surat Keputusan Tim Pembina Samsat Pusat, yaitu terdiri dari warung informasi, ruang tunggu, ruang formulir, ruang mutasi/ fiscal/BPKB, ruang pendaftaran/penetapan, ruang pembayaran/penyerahan, ruang kasir, ruang pelayanan, ruang arsip, ruang rapat, ruang kepala urusan STNK/PT Jasa Raharja, ruang CPU supervisor, gudang dan WC pegawai.

Samsat Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya termasuk pelayanan kepada Wajib Pajak didukung oleh 49 personil, yang terdiri dari 18 orang dari Polda DIY, 29 orang dari DPPKA Provinsi DIY, dan 2 orang dari Kantor Perwakilan PT Jasa Raharja (Persero) di Yogyakarta. Apabila dilihat dari tipe kantor yang termasuk tipe A, maka jumlah personil Samsat Kota Yogyakarta belum memenuhi standar. Seharusnya jumlah personilnya sebanyak 60 orang, yang terdiri dari 23 orang dari Polda DIY, 36 orang dari DPPKA Provinsi DIY, dan 2 orang dari Kantor Perwakilan PT Jasa Raharja (Persero) di Yogyakarta.

Keputusan Tim Pembina Samsat Pusat untuk jumlah pegawai Samsat terlihat tidak rasional. Karena jumlah pegawai Samsat hanya didasarkan pada jumlah Wajib Pajak yang dilayani setiap hari. Pelayanan Samsat yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Wajib Pajak pasti akan sulit terlaksana. Seharusnya dasar penentuan jumlah pegawai Samsat itu didasarkan pada rasio antara jumlah petugas Samsat dengan jumlah pemilik kendaraan bermotor.

Sehingga akan lebih rasional, karena Samsat juga tidak bisa membatasi Wajib Pajak yang datang ke Samsat setiap harinya maksimal hanya 1000 orang.

Samsat Kota Yogyakarta menetapkan Panduan Sistem Manajemen Mutu dalam rangka memberikan pelayanan yang sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Panduan Sistem Manajemen Mutu ini menetapkan dasar dan panduan dalam memberikan jasa pelayanan yang dapat diterima oleh Wajib Pajak dan memuat ketentuan untuk diterapkan serta dipelihara agar proses pelayanan yang dilaksanakan dapat terkendali. Ini dilakukan dalam upaya memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak dan mengadakan pengawasan serta evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) tahun 1 (satu) kali.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah semua individu yang tergolong dalam wajib pajak kendaraan bermotor yang masih aktif dalam melakukan pembayaran kewajiban pajaknya dan terdaftar di Kantor Samsat Kota Yogyakarta. Rincian jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel berikut:

Data Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Yogyakarta Tahun 2017

Tabel 3.1

Data Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Yogyakarta

Tahun 2017

NO	BULAN	PENERIMAAN PKB	
		KBM	JUMLAH
1	JANUARI	24.547	13.020.767.350
2	FEBRUARI	21.557	11.315.755.750
3	MARET	23.642	12.867.808.200
4	APRIL	20.658	11.490.994.000
5	MEI	22.531	12.577.863.300
6	JUNI	18.221	10.580.595.700
7	JULI	24.563	13.298.003.000
8	AGUSTUS	25.783	13.882.087.650
9	SEPTEMBER	25.282	13.370.509.750
10	OKTOBER	26.456	13.850.035.150
11	NOVEMBER	24.075	13.146.114.750
12	DESEMBER	22.247	12.941.063.300
	JUMLAH	279.562	152.341.597.900

Sumber : Samsat Kota Yogyakarta (2017)

Berdasarkan data dari tabel tersebut, pada tahun 2017 kendaraan bermotor yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan data yang diberikan oleh Kantor Samsat Kota Yogyakarta berjumlah 279.562 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh dua) kendaraan. Dan jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berjumlah Rp 152.341.597.900 (seratus lima puluh dua miliar tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah). Dalam penelitian ini tidak semua wajib pajak kendaraan bermotor menjadi obyek penelitian, hanya sebagian besar saja dikarenakan jumlahnya sangat besar dan guna efisiensi waktu dan biaya. Untuk menentukan ukuran sampel wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di Kantor Samsat Kota

Yogyakarta digunakan rumus *Slovin*, dengan metode penentuan sampel adalah teknik *convenience sampling* yaitu sebagai berikut :

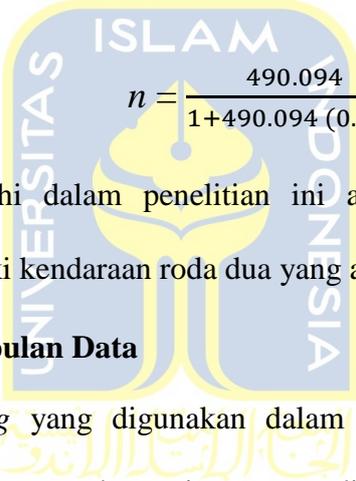
$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = Sampel

N = Populasi

e = Persentase kesalahan yang dapat ditolelir akibat ketidakteelitian pengambilan sampel


$$n = \frac{490.094}{1 + 490.094 (0.1)^2} = 100$$

Sampel yang memenuhi dalam penelitian ini adalah sebagian wajib pajak kendaraan yang memiliki kendaraan roda dua yang ada di Kota Yogyakarta.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *convenience sampling* karena data primer yang digunakan dalam penelitian ini dipilih secara acak. Data primer adalah data yang berasal langsung dari sumber permasalahan yang diteliti (Widnyani dan Suardana, 2016). Sehingga nantinya data dikumpulkan menggunakan kuisioner.

3.4 Variabel Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini memiliki satu variabel dependen dan lima variabel independen. Variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independennya adalah kesadaran pajak, kualitas pelayanan, penerapan e-samsat, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak.

3.4.1 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan Perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dalam (Susilawati & Ketut, 2013). Adapun indikator kepatuhan pajak dalam penelitian ini adalah: (1) wajib pajak dapat menghitung pajak sendiri, (2) wajib pajak membayar pajak dan melakukan pelaporan dengan tepat waktu (3) wajib pajak membayar pajak dalam jumlah yang sesuai peraturan, (4) Wajib pajak melaksanakan peraturan pajak yang berlaku. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuisisioner dari penelitian (Putri & Jati, 2012) dan (Angkoso, 2010) (Wardani & Rumiyatun, 2017) dan Abdillah (2017) yang terdiri dari 5 (lima) pertanyaan dengan menggunakan skala interval 1-5.

3.4.2 Kesadaran Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mengerti, mengetahui, dan melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak (Ilhamsyah, Endang, & Dewantara, 2016). Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Semakin masyarakat sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak akan berdampak positif terhadap penerimaan pajak, dan jika wajib pajak tidak memiliki kesadaran atau kewajiban perpajakannya maka akan berdampak terhadap berkurangnya penerimaan perpajakan yang diterima oleh negara.

Variabel diukur dengan menggunakan instrumen kuisisioner dari penelitian (Hardiningsih, 2011) dan (Wardani & Rumiyatun, 2017) yang terdiri dari 5 pertanyaan dengan menggunakan skala 1-5.

3.4.3 Kualitas Pelayanan

Menurut Boediono dalam bukunya (Supadmi, 2006) “pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan inter personal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan”.

Indikator kualitas pelayanan dalam penelitian ini adalah kemampuan petugas samsat melakukan pelayanan, fasilitas fisik yang tersedia, keramahan dan kesopanan petugas, respon petugas samsat, standar pelayanan. Variabel diukur menggunakan instrumen kuisioner dari penelitian (Dewi, 2015) yang terdiri dari 5 pertanyaan dengan menggunakan skala interval 1-5.

3.4.4 Penerapan E-Samsat

E-samsat atau elektronik samsat adalah layanan pembayaran kendaraan bermotor yang dilakukan melalui e-banking atau ATM Bank yang telah ditentukan. E-samsat ini dapat memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya. E-samsat ini telah diterapkan di Pulau Jawa dan Bali. Di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan elektronik samsat melalui ATM Bank BPD DIY. Dengan adanya layanan elektronik samsat ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor, serta menghindari adanya pungutan liar (pungli). Tata cara menggunakan elektronik samsat di Bank BPD DIY (Mahrizal, 2017):

- a. Memastikan Nomor Induk Kendaraan (NIK) telah terdaftar di Kantor Samsat dan Bank BPD DIY.

- b. Memasukkan kartu ATM Bank BPD DIY, memilih menu pembayaran kemudian pilih menu layanandilanjutkan memilih menu pembayaran pajak, berikutnya pilih menu samsat.
- c. Kemudian masukkan 2 digit kode Dati (daerah tinggal) diikuti dengan tanggal jatuh tempo kendaraan, kemudian akan tampil konfirmasi data tagihan STNK.
- d. Setelah itu, beralih ke kios e-samsat Jogja kemudian masukkan nomer referensi. Selanjutnya pilih tombol SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) untuk mencetak notice pajak.
- e. Kemudian mengecek STNK dan merapikan STNK sesuai dengan arah kertas. Selanjutnya mengklik tombol validasi STNK untuk melakukan pengesahan.

E-samsat atau elektronik samsat adalah layanan pembayaran kendaraan bermotor yang dilakukan melalui e-banking atau ATM Bank yang telah ditentukan. Dengan diterapkannya e-samsat dapat memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Variabel penerapan e-samsat dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan instrumen kuisisioner dari penelitian (Ariska, 2013) yang terdiri dari 5 pertanyaan dengan menggunakan skala interval 1-5.

3.4.5 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Hardiningsih, Pancawati, & Yulianawati,

2011). Adapun indikator pengetahuan pajak ini adalah: (1) Dasar-dasar perpajakan (2) Fungsi pajak (3) jenis-jenis pajak (4) Asas-asas pemungutan pajak (5) Undang-undang tentang tata cara perpajakan (6) Pengetahuan tentang sanksi perpajakan (7) Pengalaman.

Dengan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang pajak, masyarakat akan lebih memahami pentingnya membayar pajak, dan apa manfaatnya dapat dirasakan secara langsung dan tidak langsung. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya mungkin orang akan merasa ragu untuk membayar pajak. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh 42nstrum pajak (Arum, 2012). Menurut (Widyaningsih, 2011), pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang diterapkan pada sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor yaitu Official Assessment System.

Pengukuran instrumen ini menggunakan instrumen kuisisioner dari penelitian (Burhan, 2015) dan (Wardani & Rumiyyatun, 2017) yang terdiri dari 5 pertanyaan dengan skala interval 1-5.

3.4.6 Sanksi Pajak

Sanksi adalah hukuman negatif yang diberikan kepada orang yang melanggar Peraturan (Ummah, 2015). Sanksi perpajakan menjadi suatu jaminan atau pencegahan (*preventif*) agar peraturan perpajakan yang sudah diatur dapat ditaati dan tidak dilanggar oleh wajib pajak (Mardiasmo, 2011).

Menurut Wardani dan Rumiyyatun (2017) Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa

yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti dan/atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma.

Variabel diukur menggunakan instrumen kuisioner dari penelitian (Dewi, 2015) dan (Wardani & Rumiyatun, 2017) yang terdiri dari 5 pertanyaan dengan menggunakan skala interval 1-5.

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Analisis Statistika Deskriptif

Analisis statistika deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran umum tentang variabel yang digunakan dalam suatu penelitian. Analisis statistika deskriptif ini memberikan gambaran suatu data yang dapat dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standard deviasi atas jawaban responden dari setiap variabel.

3.6 Uji Kualitas Data

3.6.1 Uji Validitas

Analisis validitas bertujuan untuk menguji apakah tiap butir pertanyaan benar-benar telah sah, paling tidak kita dapat menetapkan derajat yang tinggi dari kedekatandata yang diperoleh dengan apa yang kita yakini dalam pengukuran. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2009).

Pengujian validitas ini menggunakan pendekatan *Pearson Correlation*. Jika korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat signifikansi dibawah 0.05 maka butir pertanyaan tersebut dikatakan valid, dan sebaliknya.

Uji validitas digunakan bertujuan untuk menguji tingkat kepatuhan instrumen dalam mengukur variable Kesadaran Wajib Pajak (KWP), Kualitas Pelayanan (KP), Penerapan E-Samsat (PES), Pengetahuan Pajak (PP), Sanksi Pajak (SP), dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (KWPKB).

3.6.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian atau keakuratan yang ditunjukkan oleh instrumen pengukuran. Menurut (Ghozali, 2009), uji reliabilitas dikatakan untuk suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Analisis keandalan butir bertujuan untuk menguji konsistensi butir-butir pertanyaan dalam mengungkap indikator. Perhitungan keandalan butir dalam penelitian ini dengan melihat r hasil yaitu nilai alpha. Pengujian reliabilitas juga dilakukan secara statistik, yaitu dengan menghitung besarnya nilai *cronbach alpha*.

3.7 Uji Asumsi Klasik

3.7.1 Uji Normalitas

Menurut (Ghozali, 2009) uji normalitas data dapat juga menggunakan uji one sample kolmogrov-smirnov test untuk mengetahui signifikansi data yang terdistribusi normal.

3.7.2 Uji Multikolinearitas

Secara ekstrem ada kemungkinan terjadinya dua variabel dependen atau lebih mempunyai hubungan (korelasi) yang kuat, sehingga pengaruh masing-masing variabel dependen tersebut terhadap variabel independen sukar untuk dibedakan. Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengidentifikasi ada tidaknya hubungan antara variabel independen dalam model regresi.

Nilai tolerance yang lebih besar dari 10% dan VIF kurang dari 10 pada uji multikolinearitas dapat menyimpulkan bahwa model regresi bebas dari masalah multikolinearitas (Pratiwi & Setyawan, 2014).

3.7.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Uji ini dilakukan dengan cara melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *Scatter Plot* antara ZPRED (nilai prediksi variabel) dengan SRESID (nilai residualnya) (Ghozali, 2013). Model regresi dikatakan bebas heteroskedastisitas apabila signifikansi t dari hasil meregresi nilai absolut residual terhadap variabel bebas lebih dari 0.05 (Pratiwi & Setyawan, 2014).

3.7.4 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) diartikan sebagai seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap perubahan variabel dependen. Dari ini diketahui sebaerapa besar variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel independenya, sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model. Koefisien determinasi berkisar dari nol sampai dengan satu ($0 < R^2 < 1$). Hal ini berarti bila

$R^2 = 0$ menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin besar koefisien determinasi suatu persamaan regresi maka semakin besar pula pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2009)

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap satu variabel independen, maka (R^2) pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak penelitian mengajukan untuk menggunakan nilai adjusted (R^2) pada saat mengevaluasi mana model regresi yang terbaik. Nilai adjusted (R^2) dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambah ke dalam model (Ghozali, 2009).

3.8 Analisis Regresi Berganda

Hipotesis dalam penelitian ini akan diuji menggunakan teknik regresi berganda untuk mencari variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi berganda digambarkan dalam bentuk rumus sebagai berikut :

$$KWPKB = \alpha + \beta_1 KWP + \beta_2 KP + \beta_3 PES + \beta_4 PP + \beta_5 SP + e \dots \dots \dots$$

Keterangan:

KWPKB : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

α : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$: Koefisien Regresi

KWP : Kesadaran Wajib Pajak

KP : Kualitas Pelayanan

PES : Penerapan E-samsat

PP : Pengetahuan Pajak
SP : Sanksi Pajak
e : Standar *error*

3.8.1 Uji t

Pengujian ini dimaksudkan untuk membuktikan hipotesis yang diajukan, apakah variabel-variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji nilai t digunakan untuk mengetahui pengaruh variable-variabel tersebut secara parsial atau sendiri-sendiri terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengujian hipotesis dilakukan melalui regresi yang menggunakan program SPSS dengan membandingkan tingkat signifikansinya (Sig t) masing-masing variabel independen dengan taraf sig $\alpha = 0.05$. apakah tingkat signifikansinya (Sig t) lebih kecil daripada $\alpha = 0.05$, maka hipotesisnya diterima yang artinya variabel independen tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya. Sebaliknya jika tingkat signifikannya (Sig t) lebih besar daripada $\alpha = 0.05$, maka hipotesisnya tidak diterima yang artinya variabel independen tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya.

3.9 Hipotesa Operasional

3.9.1 Kesadaran Pajak

H_0 ; $\beta_2 \leq 0$: Kualitas pelayanan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H_A ; $\beta_2 > 0$: Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3.9.2 Kualitas Pelayanan

$H_{02}; \beta_1 \leq 0$: Kesadaran pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

$H_{A2}; \beta_1 > 0$: Kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3.9.3 Penerapan E-Samsat

$H_{03}; \beta_3 \leq 0$: Penerapan E-samsat tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

$H_{A3}; \beta_3 > 0$: Penerapan E-samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3.9.4 Pengetahuan Pajak

$H_{04}; \beta_4 \leq 0$: Pengetahuan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

$H_{A4}; \beta_4 > 0$: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3.9.5 Sanksi Pajak

$H_{05}; \beta_5 \leq 0$: Sanksi Pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

$H_{A5}; \beta_5 > 0$: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini yaitu seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Samsat Kota Yogyakarta dengan jumlah responden sebanyak 100 orang. Kuisisioner yang berjumlah 100 diberikan kepada responden yang telah diisi secara lengkap dan benar sehingga layak untuk dianalisis lebih lanjut untuk kepentingan penelitian ini. Karakteristik responden dikelompokkan beberapa jenis seperti NPWP, jenis kelamin, usia, pekerjaan dan pendidikan terakhir. Untuk memperjelas karakteristiknya yang dimaksud, maka dijelaskan tabel mengenai responden seperti dijelaskan berikut ini:

4.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1 Tabel Presentase Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Laki-laki	57	57%
Perempuan	43	43%
Total	100	100%

Sumber: Data Primer Diolah (2019)

Berdasarkan data karakteristik responden di atas berdasarkan jenis kelamin pada tabel maka jumlah responden terbesar adalah responden yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 57 orang atau 57%. sedangkan jumlah responden terendah adalah responden yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 43

orang atau 43%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki.

4.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan usia, maka responden dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut

Tabel 4.2
Presentase Usia Responden

Usia	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
25-34 Tahun	34	34%
35-40 Tahun	17	17%
41-45 Tahun	13	13%
≥ 46 Tahun	36	36%
Total	100%	100%

Sumber: Data Primer Diolah (2019)

Berdasarkan Tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah responden terbesar adalah responden yang berusia ≥ 46 tahun yaitu sebanyak 36 orang atau 36 %. Sedangkan jumlah responden terendah adalah responden yang berusia 41-45 tahun yaitu sebanyak 13 orang atau 13%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden berusia ≥ 46 tahun.

4.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Tabel 4.3
Presentase Jenis Pekerjaan Responden

Pendidikan	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Tidak Bekerja	3	3 %
Pegawai BUMN	3	3 %
PNS	39	39 %
Wirausaha	13	13 %
Karyawan Swasta	16	16 %
Lainya	26	26 %
Total	100	100%

Sumber: Data Primer diolah (2019)

Berdasarkan data karakteristik responden berdasarkan jenis pekerjaan pada tabel di atas, maka jumlah responden terbesar adalah responden PNS yaitu sebanyak 39 orang atau 39%. Sedangkan jumlah responden terendah adalah responden Tidak Bekerja dan Pegawai BUMN masing-masing yaitu 3 orang atau 3%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden yang bekerja sebagai PNS.

4.1.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 4.4
Presentase Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
SMA	50	50 %
S1	30	30 %
S2	9	9 %
Lainya	11	11 %
Total	100	100%

Sumber: Data Primer Diolah (2019)

Berdasarkan data karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir pada tabel di atas, maka jumlah responden terbesar adalah responden SMA yaitu

sebanyak 50 orang atau 50%. Sedangkan jumlah responden terendah adalah responden S2 yaitu 9 orang atau 9%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden adalah yang memiliki pendidikan terakhir SMA.

4.2 Analisis Statistika Deskriptif

Tujuan dari analisis statistika deskriptif adalah untuk mengetahui gambaran umum tentang variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut. Analisis statistika deskriptif ini menggunakan nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standard deviasi atas jawaban responden dari setiap variabel. Hasil analisis statistika deskriptif variabel penelitian sebagai berikut:

Tabel 4.5
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Wajib Pajak	100	2.60	5.00	3.6360	.67413
Kualitas Pelayanan	100	2.20	5.00	3.5640	.72662
Penerapan E-Samsat	100	2.00	5.00	2.9800	.67240
Pengetahuan	100	2.20	5.00	3.5000	.70295
Sanksi Pajak	100	2.00	5.00	3.4180	.68937
Kepatuhan Wajib Pajak	100	2.40	5.00	3.7880	.81194
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Hasil Olah Data Primer, 2019

Dari hasil analisis data diatas, maka dapat dijelaskan secara rinci masing-masing variabel sebagai berikut:

a. Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Hasil penilaian responden terhadap variabel kesadaran wajib pajak menghasilkan nilai minimum responden sebesar 2,60 dan nilai maksimum responden sebesar 5,00. Nilai rata-rata (*mean*) variabel kesadaran wajib pajak adalah 3,6360 dengan standar deviasi sebesar 0,67413. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti bahwa dari skala 1-5, *range* jawaban responden pada variabel kesadaran wajib pajak terletak antara setuju dan sangat setuju. Sedangkan standar

deviasi sebesar 0,67413 menunjukkan bahwa penyimpangan data tersebut kecil karena standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata.

b. Kualitas Pelayanan (X2)

Hasil penilaian responden terhadap variabel kualitas pelayanan menghasilkan nilai minimum responden sebesar 2,20 dan nilai maksimum responden sebesar 5,00. Nilai rata-rata (*mean*) variabel kesadaran wajib pajak adalah 3,5640 dengan standar deviasi sebesar 0,72662. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti bahwa dari skala 1-5, *range* jawaban responden pada variabel kesadaran wajib pajak terletak antara setuju dan sangat setuju. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,72662 menunjukkan bahwa penyimpangan data tersebut kecil karena standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata.

c. Penerapan *E-Samsat* (X3)

Hasil penilaian responden terhadap variabel penerapan *e-samsat* menghasilkan nilai minimum responden sebesar 2,00 dan nilai maksimum responden sebesar 5,00. Nilai rata-rata (*mean*) variabel pengetahuan perpajakan adalah 2,9800 dengan standar deviasi sebesar 0,67240. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti bahwa dari skala 1-5, *range* jawaban responden pada variabel penerapan *e-samsat* terletak antara tidak setuju dan setuju. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,67240 menunjukkan bahwa penyimpangan data tersebut kecil karena standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata.

d. Pengetahuan Pajak (X4)

Hasil penilaian responden terhadap variabel pengetahuan perpajakan menghasilkan nilai minimum responden sebesar 2,20 dan nilai maksimum

responden sebesar 5,00. Nilai rata-rata (*mean*) variabel pengetahuan perpajakan adalah 3,5000 dengan standar deviasi sebesar 0,70295. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti bahwa dari skala 1-5, *range* jawaban responden pada variabel pengetahuan perpajakan terletak antara setuju dan sangat setuju. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,70295 menunjukkan bahwa penyimpangan data tersebut kecil karena standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata.

e. Sanksi Pajak (X5)

Hasil penilaian responden terhadap variabel sosialisasi perpajakan menghasilkan nilai minimum responden sebesar 2,00 dan nilai maksimum responden sebesar 5,00. Nilai rata-rata (*mean*) variabel sosialisasi perpajakan adalah 3,4180 dengan standar deviasi sebesar 0,68937. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti bahwa dari skala 1-5, *range* jawaban responden pada variabel sosialisasi perpajakan terletak antara setuju dan sangat setuju. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,68937 menunjukkan bahwa penyimpangan data tersebut kecil karena standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata.

f. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hasil penilaian responden terhadap variabel kepatuhan wajib pajak menghasilkan nilai minimum responden sebesar 2,40 dan nilai maksimum responden sebesar 5,00. Nilai rata-rata (*mean*) variabel kepatuhan wajib pajak adalah 3,7880 dengan standar deviasi sebesar 0,81194. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti bahwa dari skala 1-5, *range* jawaban responden pada variabel kepatuhan wajib pajak terletak antara setuju dan sangat setuju. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,81194 menunjukkan bahwa penyimpangan data tersebut kecil karena standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata.

4.3 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya kuisioner yang dibagikan kepada responden. Untuk mengetahui suatu kuisioner dapat dikatakan valid maka nilai r hitung $>$ r tabel. Dalam penelitian ini, jumlah data yang dapat digunakan sebanyak 100 kuisioner, maka diperoleh nilai $(df) = 100 - 2$ dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 5\%$), maka nilai (df) dari 98 adalah 0.1348 uji validitas ini menggunakan aplikasi SPSS. Berikut adalah hasil uji validitas.

Tabel 4.6

Uji Validitas

Variabel	Item	Pearson Correlation	Sig.	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (KWPKB)	KWPKB.1	1	0,000	Valid
	KWPKB.2	0.841	0,000	Valid
	KWPKB.3	0.808	0,000	Valid
	KWPKB.4	0.825	0,000	Valid
	KWPKB.5	0.663	0,000	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Variabel	Item	Pearson Correlation	Sig.	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (KWP)	KWP.1	1	0,000	Valid
	KWP.2	0.630	0,000	Valid
	KWP.3	0.469	0,000	Valid
	KWP.4	0.458	0,000	Valid
	KWP.5	0.569	0,000	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Variabel	Item	Pearson Correlation	Sig.	Keterangan
Kualitas Pelayanan (KP)	KP.1	1	0,000	Valid
	KP.2	0.796	0,000	Valid
	KP.3	0.668	0,000	Valid
	KP.4	0.634	0,000	Valid
	KP.5	0.695	0,000	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Variabel	Item	Pearson Correlation	Sig.	Keterangan
Penerapan E-Samsat (PES)	PES.1	1	0,000	Valid
	PES.2	0.718	0,000	Valid
	PES.3	0.692	0,000	Valid
	PES.4	0.669	0,000	Valid
	PES.5	0.597	0,000	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Variabel	Item	Pearson Correlation	Sig.	Keterangan
Pengetahuan Pajak (PP)	PP.1	1	0,000	Valid
	PP.2	0.684	0,000	Valid
	PP.3	0.682	0,000	Valid
	PP.4	0.640	0,000	Valid
	PP.5	0.512	0,000	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Variabel	Item	Pearson Correlation	Sig.	Keterangan
Sanksi Pajak (SAP)	SAP.1	1	0,000	Valid
	SAP.2	0.633	0,000	Valid
	SAP.3	0.706	0,000	Valid
	SAP.4	0.766	0,000	Valid
	SAP.5	0.529	0,000	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Dengan melihat tabel, diatas dapat diketahui bahwa besarnya koefisien korelasi dari seluruh butir pertanyaan variabel-variabel penelitian. Berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi seluruh butir pertanyaan memiliki signifikansi pearson correlation lebih besar dari r tabel, dimana r tabel sebesar 0.1654 (r hitung > t tabel). Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa butir-butir pertanyaan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian selanjutnya.

4.4 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah pengujian untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat diandalkan. Dalam penelitian ini pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah kuisioner yang dibagikan kepada responden memenuhi syarat *reliable*. Suatu kuesioner dapat dikatakan *reliable* jika nilai *Cronbach alpha* lebih besar dari 0,5 atau 50%.

Uji reliabilitas ini menggunakan aplikasi SPSS. Berikut adalah hasil uji reliabilitas:

Tabel 4.7
Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	0.953	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0.877	Reliabel
Kualitas Pelayanan Pajak	0.921	Reliabel
Penerapan E-Samsat	0.917	Reliabel
Pengetahuan Pajak	0.916	Reliabel
Sanksi Pajak	0.898	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel karena koefisien *Cronbach alpha* lebih besar dari 0,5. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa butir-butir pertanyaan dapat digunakan sebagai instrumen untuk penelitian selanjutnya.

4.5 Uji Asumsi Klasik

4.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat suatu data terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah analisis regresi variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan variabel bebas yaitu sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak dan kesadaran pajak itu memiliki berdistribusi normal atau tidak. Suatu data dapat dikatakan berdistribusi normal, apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. Model analisis regresi yang bagus hendaknya berdistribusi normal atau mendekati

normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas ini menggunakan aplikasi SPSS.

Berikut adalah hasil dari uji normalitas:

Tabel 4.8
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Standardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.97442031
Most Extreme Differences	Absolute	.103
	Positive	.103
	Negative	-.056
Kolmogorov-Smirnov Z		1.026
Asymp. Sig. (2-tailed)		.243

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data primer yang diolah , 2019

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel, dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi ini terdistribusi normal, karena nilai probabilitas yang dihasilkan yaitu 0,243 lebih besar dari 0,05. Maka model regresi ini layak untuk digunakan analisis selanjutnya.

4.5.2 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas terjadi jika terdapat hubungan linier antara independen variabel yang dilibatkan dalam model. Jika terjadi gejala multikolinearitas yang tinggi, *standard error* koefisien regresi akan semakin besar dan mengakibatkan *confidence interval* untuk pendugaan parameter semakin lebar, dengan demikian terbuka kemungkinan terjadi kekeliruan, menerima hipotesis yang salah. Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengidentifikasi ada tidaknya hubungan antara variabel independen dalam model regresi. Adanya multikolinearitas dapat dilihat

dari *tolerance value* atau nilai *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* yang lebih besar dari 10% dan VIF kurang dari 10 pada uji multikolinearitas dapat menyimpulkan bahwa model regresi bebas dari masalah multikolinearitas (Pratiwi & Setyawan, 2014). Dalam penelitian ini, uji multikolinearitas ini menggunakan aplikasi SPSS. Berikut adalah hasil dari uji multikolinearitas :

Tabel 4.9
Uji Multikolinearitas

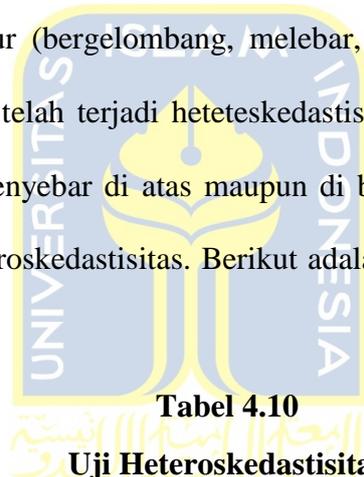
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 Kesadaran Wajib Pajak	.657	1.523
Kualitas Pelayanan	.556	1.799
Penerapan E-Samsat	.924	1.082
Pengetahuan Pajak	.545	1.835
Sanksi Pajak	.647	1.545

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa tolerance dan VIF dari variabel KWP adalah sebesar 0,657 dan 1.523, untuk variabel KP adalah sebesar 0,556 dan 1.799, untuk variabel PES adalah sebesar 0,924 dan 1.082, untuk variabel PP adalah sebesar 0,545 dan 1.835, sedangkan variabel SP adalah 0,647 dan 1.545. oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa persamaan model regresi tidak mengandung masalah multikolinearitas yang artinya tidak ada korelasi diantara variabel-variabel bebas sehingga layak digunakan untuk analisis lebih lanjut karena nilai tolerance berada di bawah 1 dan nilai VIF jauh dibawah angka 10.

4.5.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka hal ini disebut homoskedastisitas, sedangkan jika *variance* berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik yaitu yang bersifat homoskedastisitas. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik *scatterplot*. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka telah mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu y maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini.



Tabel 4.10
Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.262	.522		.503	.616
	Kesadaran Wajib Pajak	.204	.109	.229	1.878	.064
	Kualitas Pelayanan	.104	.110	.126	.951	.344
	Penerapan E-Samsat	.145	.092	.161	1.575	.119
	Pengetahuan Pajak	-.148	.115	-.172	-1.290	.200
	Sanksi Pajak	-.155	.107	-.177	-1.447	.151

a. Dependent Variable: ABS_RES
Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel hasil uji heteroskedastisitas, dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari heteroskedastisitas. Karena masing-masing variabel memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05.

4.5.4 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nilai R^2 terletak antara 0 sampai dengan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Tujuan menghitung koefisien determinasi adalah untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS. Dari hasil analisis data diperoleh hasil sebagai berikut



Tabel 4.11
Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.763 ^a	.582	.559	.53905

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Penerapan E-Samsat, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak.

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel, diperoleh hasil bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,559 hal ini berarti Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Penerapan E-Samsat, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak mampu menjelaskan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 55,9%, setelah disesuaikan terhadap sampel dan variabel independen. Sedangkan sisanya 44,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

4.6 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji dua pengaruh atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Persamaan regresi dapat dilihat dari tabel hasil uji *coefficients*. Pada tabel *coefficients* yang dibaca adalah nilai kolom B, baris pertama menunjukkan konstanta dan baris selanjutnya menunjukkan konstanta variabel independen.

Berikut adalah hasil dari linier berganda sehingga diperoleh nilai statistik sebagai berikut :

Tabel 4.12
Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.583	.476		-1.226	.223		
	Kesadaran Wajib Pajak	.253	.099	.210	2.548	.012	.657	1.523
	Kualitas Pelayanan	.207	.100	.185	2.068	.041	.556	1.799
	E-Samsat	.130	.084	.108	1.551	.124	.924	1.082
	Pengetahuan	.231	.104	.200	2.217	.029	.545	1.835
	Sanksi Pajak	.444	.098	.377	4.546	.000	.647	1.545

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil olah data, 2019

Berdasarkan tabel maka model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$KWPKB = -.583 + .253 KWP + .207 KP + .130 PES + .231 PP + .444 SP + e$$

Berdasarkan model regresi dan tabel di atas maka hasil regresi berganda dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persamaan regresi linier berganda pada tabel 4.4 diketahui mempunyai konstanta sebesar -0,583 dengan tanda negatif. Sehingga besar konstanta menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen (KWP, KP, PES,

PP dan SP) diasumsikan konstan, maka variabel dependen yaitu KWPKB akan naik sebesar -0,583%.

2. Koefisien variabel KWP adalah 0,253 yang artinya jika KWP mengalami kenaikan setiap 1% maka KWPKB akan naik sebesar 0,253%.
3. Koefisien variabel KP adalah 0,207 yang artinya jika KP mengalami kenaikan setiap 1% maka KWPKB akan naik sebesar 0,207%.
4. Koefisien variabel PES adalah 0,130 yang artinya jika PES mengalami kenaikan 1% maka KWPKB akan naik sebesar 0,130%.
5. Koefisien variabel PP adalah 0,231 yang artinya jika PP mengalami kenaikan setiap 1% maka KWPKB akan naik sebesar 0,231%.
6. Koefisien variabel SP adalah 0,444 yang artinya jika SP mengalami kenaikan 1% maka KWPKB akan menurun sebesar 0,444%.

4.6.1 Uji t

Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen (KWP, KP, PES, PP, SP) terhadap variabel dependen (KWPKB). Untuk menguji pengaruh parsial tersebut dapat dilakukan dengan cara berdasarkan nilai probabilitas. jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau 5% dan menunjukkan arah positif maka hipotesis yang diajukan diterima atau dikatakan signifikan. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5% dan menunjukkan arah negatif maka hipotesis yang diajukan ditolak atau dikatakan tidak signifikan. Hasil uji analisis regresi *coefficients* dengan menggunakan SPSS terlihat pada di bawah ini.

Tabel 4.13**Uji t****Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-.583	.476		-1.226	.223
1 Kesadaran Wajib Pajak	.253	.099	.210	2.548	.012
Kualitas Pelayanan	.207	.100	.185	2.068	.041
Penerapan E-Samsat	.130	.084	.108	1.551	.124
Pengetahuan Pajak	.231	.104	.200	2.217	.029
Sanksi Pajak	.444	.098	.377	4.546	.000

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Dari tabel diatas, hipotesis yang dapat disimpulkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengujian Hipotesis Pertama

Variabel Kesadaran Wajib pajak dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta. Hal ini dikarenakan hasil dalam penelitian ini yang dapat dilihat pada table, memiliki koefisien sebesar 0,253 dengan nilai signifikansi 0,012. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$; maka nilai signifikansi tersebut signifikan karena bernilai $0,012 < 0,05$. Sehingga hipotesis pertama penelitian ini diterima.

2. Pengujian Hipotesis Kedua

Variabel Kualitas Pelayanan dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman Yogyakarta. Hal ini dikarenakan hasil dalam penelitian ini yang dapat dilihat dari tabel, memiliki koefisien sebesar 0,207 dengan nilai signifikan 0,041. Pada tingkat signifikan $\alpha = 5\%$; maka nilai signifikan tersebut signifikan karena bernilai $0,041 < 0,05$. Sehingga hipotesis kedua penelitian ini dapat diterima.

3. Pengujian Hipotesis Ketiga

Variabel Penerapan E-Samsat dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman Yogyakarta. Hal ini dikarenakan hasil dalam penelitian ini yang dapat dilihat dari tabel, memiliki koefisien sebesar 0,130 dengan nilai signifikan 0,124. Pada tingkat signifikan $\alpha = 5\%$; maka nilai signifikan tersebut tidak signifikan karena bernilai $0,124 > 0,05$. Sehingga hipotesis ketiga penelitian ini tidak dapat diterima.

4. Pengujian Hipotesis Keempat

Variabel Pengetahuan Pajak dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman Yogyakarta. Hal ini dikarenakan hasil dalam penelitian ini yang dapat dilihat dari tabel, memiliki koefisien sebesar 0,231 dengan nilai signifikan 0,029. Pada tingkat signifikan $\alpha = 5\%$; maka nilai signifikan tersebut signifikan karena bernilai $0,029 < 0,05$. Sehingga hipotesis keempat penelitian ini dapat diterima.

5. Pengujian Hipotesis Kelima

Variabel Sanksi Pajak dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman Yogyakarta. Hal ini dikarenakan hasil dalam penelitian ini yang dapat dilihat dari tabel, memiliki koefisien sebesar 0,444 dengan nilai signifikan 0,000. Pada tingkat signifikan $\alpha = 5\%$, maka nilai signifikan tersebut signifikan karena bernilai $0,000 < 0,05$. Sehingga hipotesis kelima penelitian ini dapat diterima.

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil analisis uji hipotesis pada tabel dihasilkan nilai dari Sig bernilai $0,012 < 0,05$ yang berarti dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak akan manfaat dari membayar pajak maka akan berpengaruh pada semakin meningkatnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Menurut teori atribusi, bahwa kesadaran merupakan salah satu perilaku yang disebabkan oleh faktor internal artinya perilaku tersebut ada dibawah kendali diri. Menurut (Putri & Jati, 2012) Kesadaran wajib adalah kondisi dimana wajib pajak tersebut memahami dan melaksanakan aturan perpajakan dengan benar dan sukarela Penelitian ini sejalan dengan penelitian Wardani & Rumiyyatun (2017) dan (Putri & Jati, 2012) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat disebabkan dengan penilaian positif masyarakat (wajib pajak) bahwa membayar pajak merupakan sumbangan wajib pajak untuk terciptanya kesejahteraan bagi diri sendiri serta bangsa secara keseluruhan. Dengan memiliki pemikiran tersebut dapat menciptakan tingginya tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban membayar pajak akan semakin baik.

2. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kualitas pelayanan berpengaruh karena adanya peningkatan dalam pelayanan dari petugas samsat yang sudah baik. Hal tersebut akan membuat wajib pajak merasa penting membayar pajak, sehingga menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menjadi meningkat.

Menurut teori atribusi bahwa kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor eksternal yang bisa mempengaruhi persepsi wajib pajak untuk membayar pajak. Pengaruh eksternal itu sendiri datang dari luar diri wajib pajak itu sendiri. Yang berarti semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas samsat (sebagai pengaruh eksternal), maka wajib pajak akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan sehingga wajib pajak akan cenderung patuh dalam membayar pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Putri & Jati, 2012) bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pelayanan yang diberikan oleh kantor pajak (SAMSAT) kepada wajib pajak kendaraan bermotor maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak tersebut.

3. Pengaruh Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-samsat* berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

E-samsat atau elektronik samsat adalah layanan pembayaran kendaraan bermotor yang dilakukan melalui ATM Bank yang telah ditentukan, untuk wilayah Yogyakarta ATM Bank yang ditunjuk ialah ATM Bank BPD. Layanan *e-samsat* ini dapat memudahkan wajib pajak untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor. Layanan ini baru diterapkan dan masih kurangnya sosialisasi mengenai penerapan layanan *e-samsat* ini membuat banyak wajib pajak yang belum mengetahui tentang layanan *e-samsat*. Kemudian, masih sedikitnya masyarakat yang menggunakan ATM Bank, sehingga wajib pajak lebih memilih untuk membayarkan langsung pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yolani, Djatikusuma, & Sugara, 2014) menyatakan bahwa pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui ATM berpengaruh terhadap kepuasan wajib pajak.

4. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pengetahuan Pajak berpengaruh positif karena semakin tinggi tingkat pengetahuan yang dimiliki

wajib pajak maka wajib pajak semakin tahu apa itu pajak kendaraan bermotor, sehingga dapat membuat tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor semakin tinggi. Sebaliknya semakin rendah tingkat pengetahuan wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor semakin rendah. Karena tanpa pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan akan membuat waji pajak merasa ragu untuk membayar pajak.

Menurut teori atribusi yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membayar pajak, jika wajib pajak memiliki pemahaman tentang perpajakan, wajib pajak menjadi lebih mengerti pentingnya membayar pajak dan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Dengan begitu tingkat kepatuhan pajak dapat meningkat.

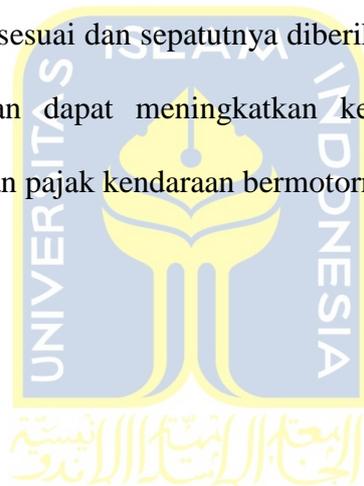
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Susilawati & Ketut, 2013) dan (Chusaeri, Daiana, & Afifudin, 2017) bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan wajib pajak kendaraan bermotor sudah memahami dan pengetahuannya tentang pajak kendaraan bermotor tinggi maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

5. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi Pajak berpengaruh positif karena wajib pajak akan berpikir bila tidak membayar pajak akan mendapat

sanksi pajak berupa denda yang menyebabkan pajak kendaraan bermotor yang dimiliki wajib pajak semakin mahal. Hal tersebut menyebabkan wajib pajak menjadi patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Susilawati & Ketut, 2013) bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib pajak yang terdaftar di kantor SAMSAT merasa kalau sanksi yang diberikan untuk pelanggar sudah sesuai dan sepatutnya diberikan bagi pelanggar. Tingginya sanksi perpajakan akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak kendaraan bermotornya.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, penerapan *e-samsat*, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini memberikan makna bahwa masih tingginya tingkat kesadaran wajib pajak untuk patuh dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya.
2. Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini memberikan makna bahwa masih tingginya tingkat kualitas pelayanan yang disediakan oleh SAMSAT kepada wajib pajak dalam membayar pajak.
3. Penerapan *e-samsat* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menjelaskan bahwa adanya penerapan *e-samsat* tidak membuat wajib pajak kendaraan bermotor patuh untuk membayarkan pajaknya.
4. Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor.

5. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan, maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayarkan pajaknya.

5.2 Keterbatasan dan Saran

Pada penelitian ini terdapat keterbatasan dan saran untuk penelitian berikutnya, sebagai berikut :

1. Pada penelitian ini menggunakan lima variabel independen yaitu kesadaran pajak, kualitas pelayanan penerapan e-samsat, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak untuk penelitian selanjutnya mungkin bisa menambahkan variabel lain seperti tingkat pendidikan, tingkat penghasilan dan variabel lainnya.
2. Disebabkan keterbatasan waktu penelitian ini hanya menggunakan sampel berjumlah 100 wajib pajak dari populasi pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kota Yogyakarta, untuk penelitian selanjutnya mungkin sampel yang digunakan sebaiknya diperbanyak sehingga dapat lebih mewakili jumlah populasi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Imtihan Faiza. 2014. "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh" 3 (4): 222–33.
- Ariska, I. (2013). Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Payment dan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Arum, Harjanti Puspa. 2012. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah KPP Pratama Cilacap)." Universitas Diponegoro.
- Aspasita, M. Select Rizqi. 2017. "Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sleman) Skripsi Oleh : Nama : M . Seleck Rizqy Aspatista Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,".
- Azjen, I. 1991. *Organizational Behavior and Human Decision*. Vol. 50, in *Theory of Planned Behavior*, 179-211.
- Berly, Angkoso. 2010. "Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Dasar Wajib Pajak tentang Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Burhan, H P. 2015. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Emiris pada wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara)." Skripsi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Chusaeri, Y., N, D., & Afifudin. (2017). *Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*.
- Dewi, K R P R. 2015. "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan dan Pemahaman Atas Saksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma.
- Dharma, G P E, and K A Suardana. 2014. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak." *E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 1: 340-353.
- Fauzan, Setiawan. 2017. "Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Yogyakarta."

- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. IV. Jakarta: BP Universitas Diponegoro.
- . 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. VII. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi. 2005. "Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak (Tax Compliance)." *Jurnal Perpajakan Indonesia* 4 (5): 4-9.
- Hardiningsih, P. 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. Vol. 3, in *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 126-143.
- Hardiningsih, Pancawati, and Nila Yulianawati. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (The Factors That Influence The Willingness To Pay The Tax)*. Vol. 3, in *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 126-142. Accessed November 2011.
- Ilhamsyah, R, M G W Endang, and R Y Dewantara. 2016. "Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)." *Jurnal Mahasiswa Perpajakan* 1: 8.
- Jati, I Made Wahyu Cahyadi I Ketut. 2016. "Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 16: 2342-73.
- Jatmiko, A N. 2006. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)." Tesis Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kepatuhan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 Tentang Kepatuhan Wajib Pajak
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
- Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
- Pratiwi, I G A M A M A, and P E Setyawan. 2014. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan Perusahaan, dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Kota Denpasar." *E- Jurnal Akuntansi Udayana* I: 139-153.

- Putri, Amanda R Siswono, and I Ketut Jati. 2012. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memabayar Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar." *Jurnal Akuntansi* (Universitas Udayana).
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Robbins, S P, and T A Judge. 2008. *Perilaku Organisasi*. 12. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2013. *Edisi Revisi Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supadmi, Ni Luh. 2006. "Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan." Accessed Mei 7, 2013. <http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/ok%20supadmi.pdf>.
- Susilawati, Ketut Evi, and Ketut Budiarta. 2013. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." *E-Jurnal Akuntansi* (Universitas Udayana) 4.2: 345-357.
- Ummah, Muslikhatul. 2015. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang." *Fakultas Ekonomi Universitas Dian Nuswantoro*, Hal. 1-14.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Penggolongan Pajak.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2009
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah
- Wardani, Dewi Kusuma, and Rumiyaun 2017. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." *Jurnal Akuntansi* 5 (1): 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>.
- Widnyani, Ida Ayu Dewi, and Ketut Alit Suardana. 2016. "Pengaruh Sosialisasi, Sanski Dan Persepsi Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor." *E-Jurnal Akuntansi*

Universitas Udayana 16: 2176–2203.

Widyaningsih, Aristianti. 2011. "Hukum Pajak dan Perpajakan." 03. Bandung: Alfabeta.

Wikanto, A, and Antara. n.d. *Realisasi Setoran Pajak di DIY 2016 Lebih Target*. <http://m.kontan.co.id/news/realisasi-setoran-pajak-di-diy-2016-lebih-target>.

Yolani, I. M., Djatikusuma, E. S., & Sugara, K. (2014). Pengaruh Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui ATM terhadap Kepuasan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang Menggunakan ATM.



Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian



FAKULTAS EKONOMI

Gedung Aca Parahidlo
Jl. Raya Uluwu, Gondongmatene, Sleman,
Yogyakarta 55243
T. (0271) 881588 Ext. 1000
F. (0271) 882099
E. fekon@uii.ac.id
W. fekon.uii.ac.id

Nomor : 082/DEK/10/Div.SDM/IV/2019
Hal : PERMOHONAN IJIN PENELITIAN

Kepada Yth.
SAMSAT Kota Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami :

Nama : Firman Adi Nugroho
No. Mahasiswa : 14312277
Jurusan : Akuntansi
Alamat : Dusun Niten RT/RW 07/12 Nogotirto Gamping Sleman

Bermaksud mohon keterangan/data pada Instansi/Perusahaan yang Saudara pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul :

" Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Bermotor di SAMSAT Kota Yogyakarta) "

Dosen Pembimbing : Mahmudi., S.E., M.Si., Dr

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data /keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perkenan dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 02 April 2019

Dekan,


Juka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D.
NIK 03 313 0101

Lampiran 2 Kuesioner

Yogyakarta, 12 Maret 2019

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Responden

Di tempat

Dengan hormat,

Saya mahasiswa tingkat akhir Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia, yang bernama **Firman Adi Nugroho**, NIM 14312277.

Saya bermaksud mengadakan penelitian di Kantor Samsat Kota Yogyakarta untuk keperluan penulisan skripsi yang berjudul “**Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**”.

Adapun tujuan pengumpulan data dalam kuesioner ini semata-mata untuk kepentingan akademis dalam rangka penyusunan skripsi. Oleh karena itu, saya harap kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu mengisi kuesioner ini. Pendapat Bapak/Ibu akan sangat bermanfaat bagi penelitian skripsi ini. Data dan informasi yang diperoleh dari kuesioner hanya akan dipergunakan untuk penelitian dan akan dijaga kerahasiaannya.

Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner ini, saya mohon agar Bapak/Ibu membaca terlebih dahulu petunjuk pengisian dan menjawab setiap pertanyaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Atas perhatian Bapak/Ibu responden, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Firman Adi Nugroho

Tata Cara Pengisian Kuesioner

Dibawah ini terdapat beberapa pertanyaan dengan maksud dan tujuan yang berbeda. Bapak/Ibu cukup memilih salah satu alternatif jawaban dengan membubuhkan tanda *checklist* (✓) pada salah satu pilihan yang dianggap paling sesuai dengan kondisi yang ada.

Demi kelancaran proses pengolahan data, kami mengharapkan Bapak/Ibu menjawab seluruh pertanyaan yang ada dengan keyakinan mendalam tanpa keaguan. Bila terdapat keraguan atas pertanyaan yang kami ajukan, Bapak/Ibu dapat memilih salah satu jawaban yang dianggap paling mendekati pendapat Bapak/Ibu sehingga semua pertanyaan memiliki satu jawaban.

Berikan tanda (✓) sesuai dengan data diri anda :

Apakah Anda memiliki NPWP : YA TIDAK

Jenis Kelamin : L P

Usia : 25-34 35-40 41-45
>46

Jenis Pekerjaan: Tidak Bekerja PNS
 Pegawai BUMN Wirausaha
 Karyawan swasta Lainnya
(Mohon Disebutkan)

.....

Tingkat Pendidikan: SMA S1 S2
Lainnya,
(Mohon disebutkan)

.....

Bapak/Ibu dapat memberikan jawaban dengan memberikan tanda (√) pada kotak yang sesuai berdasarkan apa yang anda alami, dengan petunjuk pengisian sebagai berikut :

STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

S = Setuju

SS = Sangat Setuju

SSS = Sangat Setuju Sekali

a. Kesadaran Wajib Pajak

No.	Keterangan	STS	TS	S	SS	SSS
1	Saya menyadari membayar pajak kendaraan bermotor merupakan kewajiban saya sebagai warga negara Indonesia yang baik.					
2.	Saya menyadari manfaat pajak kendaraan bermotor yang saya bayarkan adalah untuk pembangunan Negara.					
3.	Saya menyadari manfaat pajak kendaraan yang saya bayarkan akan dirasakan oleh seluruh masyarakat.					
4.	Saya menyadari bahwa fasilitas umum yang saya nikmati merupakan manfaat yang dirasakan dari pajak kendaraan bermotor.					
5.	Saya menyadari kesadaran wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak tepat waktu.					

b. Kualitas Pelayanan

No.	Keterangan	STS	TS	S	SS	SSS
1	Ketika hendak membayarkan pajak, di loka pelayanan, sudah tersedia Blangko SPT untuk wajib pajak.					
2.	Petugas pajak menerima dengan baik kritik dan saran dari wajib pajak.					
3.	Petugas pajak kendaraan bermotor memberikan informasi tentang perpajakan yang jelas.					
4.	Petugas pajak tanggap dan sangat membantu bila anda mengalami kesulitan.					
5.	Petugas pajak memberikan pelayanan dengan cepat dan memuaskan.					

c. Penerapan E-samsat

No.	Keterangan	STS	TS	S	SS	SSS
1	Kantor Samsat telah melakukan sosialisasi penerapan e-samsat baik secara langsung atau tidak langsung kepada wajib pajak.					
2.	Saya sebagai Wajib Pajak mengetahui Keputusan Korlantas Polri mengenai <i>E-Samsat</i> .					
3.	Saya sebagai Wajib Pajak mengetahui prosedur, tujuan dan manfaat penerapan e-samsat					
4.	Dengan adanya e-samsat mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak.					
5.	Wajib pajak merasa puas terhadap penerapan e-samsat.					

d. Sanksi Pajak

No.	Keterangan	STS	TS	S	SS	SSS
1	Saya menganggap sanksi yang diberikan untuk setiap pelanggaran pajak kendaraan bermotor sudah sesuai.					
2.	Sanksi pajak kendaraan bermotor sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.					
3.	Sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.					
4.	Penerapan sanksi pajak kendaraan bermotor harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.					
5.	Saya mengetahui sanksi pajak sesuai Undang-Undang yang berlaku.					

e. Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Keterangan	STS	TS	S	SS	SSS
1	Saya tidak memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor.					
2.	Saya selalu membayar pajak kendaraan bermotor tepat pada waktunya.					
3.	Saya telah menjalankan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak kendaraan bermotor.					
4.	Saya melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan kewajiban.					
5.	Saya tidak pernah melanggar peraturan pajak kendaraan bermotor.					

Lampiran 3 Hasil Kuesioner

3.1 Hasil Kuesioner Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak					
X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	TOTAL_X1
3	3	4	3	3	16
3	4	3	4	3	17
3	3	3	4	4	17
4	3	4	3	3	17
3	3	3	3	3	15
4	3	4	4	3	18
3	4	3	3	4	17
3	3	3	3	3	15
5	4	4	5	4	22
5	5	5	5	5	25
3	3	3	3	3	15
5	5	3	3	4	20
3	3	3	3	3	15
4	5	5	4	5	23
4	3	3	3	3	16
4	4	4	4	5	21
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
4	3	3	2	3	15
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25
3	3	3	3	3	15
5	3	3	3	4	18
3	3	3	3	4	16
5	4	3	3	3	18
4	3	3	3	3	16
3	4	4	3	4	18
3	4	4	3	4	18
3	3	3	3	3	15
5	4	3	3	4	19
4	4	4	3	4	19
3	4	4	3	3	17
3	4	4	3	3	17
5	3	3	3	4	18
5	4	4	3	5	21
3	3	3	2	3	14
5	4	5	4	4	22
5	5	5	5	5	25
4	3	2	2	3	14
4	4	4	4	4	20
5	5	5	4	4	23
4	4	4	4	4	20

5	5	5	5	5	25
4	3	3	3	3	16
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
3	3	5	3	4	18
3	4	3	5	4	19
3	3	4	4	4	18
4	3	3	3	4	17
5	4	3	3	4	19
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
3	3	3	4	3	16
5	5	5	4	4	23
3	3	3	3	3	15
4	5	5	3	4	21
3	3	3	3	3	15
4	4	4	4	4	20
3	3	3	3	3	15
4	3	3	4	4	18
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
4	4	3	2	3	16
3	4	4	4	4	19
5	5	3	3	3	19
4	4	3	3	3	17
3	3	3	3	3	15
4	4	4	4	4	20
4	4	3	3	3	17
3	3	3	3	3	15
5	5	4	5	3	22
4	4	5	5	5	23
5	5	5	5	4	24
3	3	2	3	5	16
5	4	2	3	5	19
3	5	3	3	3	17
5	5	5	4	4	23
5	4	3	3	5	20
5	5	4	3	3	20
5	5	5	5	5	25
3	3	4	4	4	18
3	3	3	3	3	15
5	3	3	3	4	18
3	3	3	3	3	15
4	5	2	2	4	17
4	4	4	4	4	20
3	3	3	2	4	15
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
5	3	3	3	3	17
4	3	3	3	3	16
5	5	5	5	5	25
4	3	3	3	3	16
5	5	5	5	5	25

3.2 Hasil Kuesioner Kualitas Pelayanan

No	Kualitas Pelayanan					TOTAL _X2
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	
1	3	3	3	4	4	17
2	4	3	3	4	4	18
3	3	4	3	4	4	18
4	3	4	3	3	4	17
5	3	3	4	3	3	16
6	3	3	3	3	3	15
7	4	4	4	4	4	20
8	3	3	2	2	2	12
9	5	1	3	3	1	13
10	5	5	5	5	5	25
11	3	3	3	3	4	16
12	3	3	3	3	4	16
13	3	3	3	3	3	15
14	4	5	4	5	4	22
15	3	4	4	3	3	17
16	5	4	4	4	5	22
17	3	3	3	4	4	17
18	3	3	3	4	4	17
19	3	3	4	3	3	16
20	3	3	3	3	2	14
21	3	3	4	4	4	18
22	3	3	3	3	3	15
23	3	3	3	3	3	15
24	3	2	2	2	2	11
25	4	4	4	4	4	20
26	5	5	5	5	5	25
27	3	4	4	4	4	19
28	4	4	3	4	4	19
29	3	4	3	4	5	19
30	3	3	3	4	3	16
31	4	3	3	4	3	17
32	3	4	4	5	5	21
33	3	4	4	5	5	21
34	3	3	3	3	3	15
35	3	3	3	2	2	13
36	3	3	4	3	5	18
37	4	3	3	3	4	17
38	4	3	3	3	4	17
39	5	4	5	4	4	22
40	5	5	5	5	5	25
41	3	3	3	3	3	15
42	3	4	4	4	4	19
43	5	5	3	5	5	23
44	2	2	2	3	3	12
45	3	3	3	3	3	15
46	4	5	5	4	4	22

47	3	3	3	3	3	15
48	5	5	5	5	5	25
49	3	3	3	3	3	15
50	3	3	3	3	3	15
51	3	3	3	3	3	15
52	3	4	5	3	3	18
53	3	3	3	4	4	17
54	3	4	4	4	3	18
55	3	3	4	4	5	19
56	4	3	5	5	5	22
57	3	3	3	3	3	15
58	3	3	3	3	2	14
59	3	4	4	3	3	17
60	3	4	4	3	3	17
61	3	3	3	3	3	15
62	4	3	3	3	3	16
63	3	3	3	3	3	15
64	3	3	3	3	3	15
65	3	3	3	3	3	15
66	3	3	3	3	3	15
67	3	3	3	3	3	15
68	3	3	3	3	3	15
69	4	4	4	4	4	20
70	5	5	5	4	5	24
71	3	2	3	3	3	14
72	3	3	3	3	3	15
73	3	3	3	3	3	15
74	3	3	3	3	4	16
75	3	3	3	3	3	15
76	3	3	3	3	3	15
77	5	5	5	5	5	25
78	5	5	5	5	5	25
79	5	5	4	4	5	23
80	4	5	5	3	3	20
81	3	3	2	4	4	16
82	3	3	3	3	3	15
83	5	5	4	4	5	23
84	4	4	4	4	4	20
85	3	3	3	4	4	17
86	3	3	3	3	2	14
87	3	3	3	3	3	15
88	3	3	3	3	3	15
89	3	2	4	4	3	16
90	3	2	3	2	3	13
91	3	3	4	4	3	17
92	2	3	3	3	3	14
93	4	3	3	3	4	17
94	3	3	3	3	3	15
95	3	3	3	3	3	15
96	2	3	4	4	4	17
97	3	4	3	3	3	16
98	3	3	3	3	3	15
99	3	3	3	3	3	15
100	3	3	3	3	3	15

3.3 Hasil Kuesioner E-Samsat

E-Samsat					
X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	TOTAL _X3
3	2	2	3	2	12
3	3	4	3	3	16
2	2	3	2	3	12
3	3	3	4	4	17
3	3	3	2	2	13
2	3	2	2	3	12
3	3	3	4	3	16
2	2	2	2	2	10
5	5	5	4	4	23
4	3	3	5	3	18
3	3	3	4	5	18
4	4	4	3	3	18
2	2	2	3	3	12
4	3	4	3	3	17
2	3	3	3	2	12
4	3	4	3	4	18
3	3	2	3	3	14
2	2	2	3	3	12
2	3	3	3	3	14
3	2	3	3	3	14
2	2	2	3	3	12
2	2	2	3	3	12
2	2	2	3	2	11
4	3	4	5	4	20
5	5	5	5	5	25
3	3	3	3	3	15
4	4	3	4	4	19
2	2	2	3	2	11
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
3	3	4	4	5	19
3	3	4	4	5	19
2	2	2	2	2	10
2	2	2	2	2	10
3	3	3	4	3	16
3	3	3	4	3	16
3	3	3	4	3	16
5	4	4	4	3	20
5	4	4	5	4	22
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
3	5	5	5	5	23
3	2	2	3	3	13
3	3	3	3	3	15
4	4	4	5	4	21
2	2	2	2	2	10
5	5	5	5	5	25

3.4 Hasil Kuesioner Pengetahuan

Pengetahuan					
X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	TOTAL _X4
3	3	4	4	3	17
3	4	3	4	4	18
3	3	3	4	4	17
3	4	3	3	3	16
3	3	3	4	4	17
3	3	3	3	4	16
3	3	3	4	4	17
3	3	3	3	3	15
5	4	5	5	5	24
3	3	3	3	4	16
3	3	3	3	5	17
5	3	4	3	3	18
3	2	2	2	2	11
4	4	3	4	4	19
3	3	3	3	3	15
4	3	3	4	4	18
4	3	3	4	4	18
4	3	3	4	4	18
3	4	4	4	2	17
3	2	3	3	3	14
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
3	2	2	3	3	13
5	4	4	4	4	21
5	5	5	5	5	25
3	3	3	3	3	15
4	3	4	3	3	17
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
3	4	4	3	3	17
3	4	4	3	3	17
3	3	3	3	3	15
3	3	3	4	3	16
3	4	3	3	3	16
3	3	3	4	4	17
3	3	3	4	4	17
4	4	5	3	3	19
4	4	4	4	4	20
3	3	3	3	3	15
4	4	4	3	3	18
5	5	5	5	5	25
3	3	3	2	3	14
3	3	3	3	3	15
5	4	5	5	4	23
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25

3	3	2	3	2	13
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
4	5	4	4	2	19
4	3	3	3	3	16
4	4	3	4	4	19
3	4	3	3	4	17
5	3	3	4	3	18
3	3	3	3	2	14
3	3	3	2	3	14
3	3	3	3	3	15
4	3	3	3	3	16
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
4	4	4	4	4	20
3	3	3	3	3	15
4	3	3	3	3	16
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
3	3	3	4	3	16
3	3	3	4	4	17
5	3	2	2	2	14
3	3	3	4	4	17
3	2	2	3	2	12
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
5	5	5	5	5	25
4	4	4	3	4	19
4	5	5	5	4	23
3	3	3	2	2	13
5	5	3	4	3	20
3	3	3	3	3	15
4	4	3	4	3	18
3	3	3	4	3	16
5	4	4	5	3	21
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
3	3	3	4	3	16
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
3	2	2	3	2	12
3	3	3	3	2	14
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
5	4	3	3	2	17
4	3	2	3	3	15
4	4	3	5	3	19
3	3	3	3	3	15
4	4	3	5	3	19

3.5 Hasil Kuesioner Sanksi Pajak

No	Sanksi Pajak					TOTAL_X5
	X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	
1	3	4	3	3	4	17
2	3	3	4	3	3	16
3	3	4	4	4	3	18
4	4	3	3	4	3	17
5	3	4	3	4	4	18
6	3	4	4	4	3	18
7	3	4	3	4	3	17
8	3	3	3	3	3	15
9	5	4	5	4	5	23
10	2	3	5	5	3	18
11	2	2	3	3	4	14
12	3	5	3	3	4	18
13	2	3	2	2	2	11
14	3	3	3	3	3	15
15	3	3	3	3	3	15
16	3	3	3	3	3	15
17	3	3	3	3	3	15
18	3	5	4	5	3	20
19	2	3	2	4	3	14
20	3	3	3	3	3	15
21	3	3	3	3	3	15
22	3	3	3	3	3	15
23	3	3	3	3	3	15
24	3	3	3	3	2	14
25	3	3	3	3	3	15
26	5	5	5	5	5	25
27	3	3	3	3	3	15
28	4	4	4	3	3	18
29	3	3	3	4	2	15
30	2	2	3	3	3	13
31	3	3	3	3	3	15
32	3	3	3	4	3	16
33	3	3	3	4	3	16
34	3	3	3	3	3	15
35	3	4	4	4	3	18
36	3	3	3	3	3	15
37	3	3	3	3	3	15
38	3	3	3	3	3	15
39	2	2	2	3	3	12
40	3	4	4	4	3	18
41	3	3	3	3	3	15
42	3	4	4	5	5	21
43	1	2	3	3	5	14
44	2	3	3	3	3	14
45	2	2	3	3	3	13
46	4	5	4	4	4	21
47	3	3	3	3	3	15

48	5	5	5	5	5	25
49	3	3	3	3	3	15
50	2	3	3	3	3	14
51	3	4	3	3	3	16
52	4	4	3	5	2	18
53	3	5	3	3	3	17
54	3	4	3	3	4	17
55	2	5	3	3	3	16
56	3	4	3	4	3	17
57	2	2	2	2	2	10
58	3	3	2	3	2	13
59	3	3	3	3	3	15
60	3	3	3	3	3	15
61	3	3	3	3	3	15
62	3	3	3	3	3	15
63	3	3	3	3	3	15
64	4	4	4	4	4	20
65	3	3	3	3	3	15
66	3	3	3	3	3	15
67	3	3	3	3	3	15
68	3	3	3	3	3	15
69	2	4	4	3	4	17
70	3	4	4	4	5	20
71	3	3	3	3	3	15
72	3	4	4	4	3	18
73	3	3	2	4	2	14
74	3	3	3	3	3	15
75	3	3	3	3	3	15
76	3	3	3	3	3	15
77	5	4	5	5	5	24
78	4	3	4	5	5	21
79	5	5	5	5	5	25
80	1	3	3	5	2	14
81	4	5	5	5	3	22
82	3	3	3	3	3	15
83	4	5	3	4	3	19
84	3	3	3	3	3	15
85	3	4	3	4	5	19
86	4	4	2	2	2	14
87	4	4	4	4	4	20
88	3	4	4	4	4	19
89	3	4	3	4	4	18
90	2	3	3	3	3	14
91	4	3	2	4	5	18
92	3	3	3	3	2	14
93	3	4	4	3	3	17
94	3	3	3	3	3	15
95	3	3	3	3	3	15
96	3	4	4	4	3	18
97	3	3	3	3	2	14
98	3	4	3	4	3	17
99	3	3	3	3	3	15
100	3	4	3	4	3	17

3.6 Hasil Kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak					
Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	TOTAL_Y
3	4	3	3	3	16
3	4	3	3	4	17
3	3	3	4	3	16
3	3	4	3	4	17
3	3	4	4	4	18
3	3	3	4	4	17
4	4	3	4	3	18
3	3	3	3	3	15
5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25
3	3	3	3	2	14
4	4	4	4	4	20
3	3	3	3	3	15
4	4	4	4	4	20
3	3	3	3	3	15
4	4	3	3	3	17
3	3	3	3	3	15
5	5	4	5	5	24
2	2	3	3	2	12
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
3	2	3	3	2	13
5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25
3	3	3	3	3	15
4	4	4	4	4	20
3	3	3	3	3	15
2	2	3	3	3	13
3	3	3	3	3	15
3	4	5	4	5	21
3	4	5	4	5	21
3	3	3	3	3	15
5	4	4	4	4	21
3	4	3	4	3	17
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
5	5	5	5	5	25
5	5	4	4	4	22
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
5	5	5	5	5	25
2	3	2	2	3	12
3	3	3	3	3	15
4	4	4	4	4	20
3	3	3	3	3	15
5	5	5	5	5	25
3	2	3	3	3	14

3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
4	3	4	4	3	18
3	3	3	3	4	16
4	4	4	3	4	19
5	5	4	4	3	21
3	5	5	5	5	23
5	5	5	4	5	24
3	3	3	3	3	15
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
3	3	3	3	3	15
4	4	4	4	4	20
4	4	3	3	3	17
4	4	4	4	4	20
3	3	3	3	3	15
4	4	4	4	4	20
3	3	3	3	3	15
3	4	3	3	3	16
3	4	3	4	4	18
3	3	3	3	3	15
5	4	4	4	4	21
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
5	5	5	5	5	25
4	4	3	3	3	17
3	3	3	3	3	15
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
4	5	5	4	5	23
5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25
3	3	3	3	3	15
5	5	5	5	5	25
3	3	3	3	3	15
5	4	5	5	3	22
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	3	3	4	18
5	5	5	4	5	24
5	5	4	4	2	20
2	3	3	3	2	13
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
4	4	4	4	4	20
5	3	4	5	3	20
4	4	4	4	3	19
5	5	5	5	5	25
3	3	3	3	3	15
5	5	5	5	5	25

Lampiran 4 Data Responden

No	Profil				
	NPWP	JK	Usia	Pekerjaan	Pendidikan
1	1	2	1	5	1
2	1	1	4	2	1
3	1	2	4	5	1
4	1	2	3	2	4
5	1	2	3	5	1
6	1	2	3	3	2
7	1	2	4	2	1
8	1	1	1	3	1
9	1	1	1	6	2
10	1	1	1	3	1
11	1	1	1	5	1
12	1	2	2	6	1
13	1	2	1	1	1
14	1	2	4	2	2
15	1	1	4	2	2
16	1	2	4	2	1
17	1	2	1	4	2
18	1	2	1	6	3
19	1	1	1	3	1
20	1	1	4	6	4
21	1	2	2	2	3
22	1	2	1	2	1
23	1	2	3	2	1
24	1	1	1	6	1
25	1	2	3	6	2
26	1	1	4	2	1
27	1	2	2	1	1
28	1	1	4	5	4
29	1	1	1	5	1
30	1	1	1	5	1
31	1	2	4	2	1
32	1	2	4	6	1
33	1	1	4	3	1
34	1	1	1	2	2
35	1	1	2	2	2
36	1	2	2	2	2
37	1	1	4	2	2
38	1	2	4	2	4
39	1	2	4	2	1
40	1	1	3	2	1
41	1	1	4	2	4
42	1	1	2	6	2
43	1	1	2	3	1
44	1	1	1	3	2
45	1	1	3	6	4
46	1	1	4	5	1
47	1	2	2	2	3
48	1	1	2	2	2
49	1	1	3	2	3
50	1	1	2	2	4

51	1	1	2	2	1
52	1	1	4	6	1
53	1	1	4	6	1
54	1	1	3	6	1
55	1	1	2	2	2
56	1	1	2	2	1
57	1	2	4	5	4
58	1	1	1	4	2
59	1	1	2	4	1
60	1	1	2	6	1
61	1	2	1	3	1
62	1	1	4	3	2
63	1	2	4	1	1
64	1	1	1	5	3
65	1	2	1	3	1
66	1	1	1	3	2
67	1	1	3	6	1
68	1	1	2	6	1
69	1	1	3	6	1
70	1	1	4	6	1
71	1	2	1	6	2
72	1	1	1	2	3
73	1	2	1	6	2
74	1	1	3	5	2
75	1	2	4	2	1
76	1	2	4	2	1
77	1	1	4	6	1
78	1	1	4	6	1
79	1	1	4	2	1
80	1	1	1	6	2
81	1	2	1	3	2
82	1	2	1	6	4
83	1	2	4	2	1
84	1	2	1	6	2
85	1	1	4	3	4
86	1	2	4	3	2
87	1	1	1	5	2
88	1	2	4	2	1
89	1	2	1	6	2
90	1	2	1	5	2
91	1	1	1	6	2
92	1	2	1	2	2
93	1	1	4	2	1
94	1	2	2	2	1
95	1	2	3	2	3
96	1	1	4	2	3
97	1	1	1	3	2
98	1	1	4	3	1
99	1	2	4	2	4
100	1	1	1	2	3

Lampiran 5 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Wajib Pajak	100	2.60	5.00	3.6360	.67413
Kualitas Pelayanan	100	2.20	5.00	3.5640	.72662
E-Samsat	100	2.00	5.00	2.9800	.67240
Pengetahuan	100	2.20	5.00	3.5000	.70295
Sanksi Pajak	100	2.00	5.00	3.4180	.68937
Kepatuhan Wajib Pajak	100	2.40	5.00	3.7880	.81194
Valid N (listwise)	100				



Lampiran 6 Hasil Uji Validitas
6.1 Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak

		Correlations					
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	TOTAL_ X1
X1.1	Pearson Correlation	1	.630**	.469**	.458**	.569**	.766**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	.630**	1	.655**	.582**	.631**	.854**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	.469**	.655**	1	.724**	.580**	.839**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	.458**	.582**	.724**	1	.608**	.822**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.5	Pearson Correlation	.569**	.631**	.580**	.608**	1	.818**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
TOTAL_	Pearson Correlation	.766**	.854**	.839**	.822**	.818**	1
AL_	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
X1	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

6.2 Hasil Uji Validitas Kualitas Pelayanan

		Correlations					
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	TOTAL_ X2
X2.1	Pearson Correlation	1	.796**	.668**	.634**	.695**	.867**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	.796**	1	.775**	.653**	.688**	.900**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	.668**	.775**	1	.671**	.644**	.861**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	.634**	.653**	.671**	1	.792**	.856**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.5	Pearson Correlation	.695**	.688**	.644**	.792**	1	.878**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
TOTAL_	Pearson Correlation	.867**	.900**	.861**	.856**	.878**	1
X2	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

6.3 Hasil Uji Validitas Penerapan E-Samsat

		Correlations					
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	TOTAL_X3
X3.1	Pearson Correlation	1	.718**	.692**	.669**	.597**	.847**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	.718**	1	.810**	.688**	.581**	.878**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.3	Pearson Correlation	.692**	.810**	1	.685**	.689**	.893**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.4	Pearson Correlation	.669**	.688**	.685**	1	.753**	.880**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.5	Pearson Correlation	.597**	.581**	.689**	.753**	1	.834**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
TOTAL_X3	Pearson Correlation	.847**	.878**	.893**	.880**	.834**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

6.4 Hasil Uji Validitas Pengetahuan Pajak

		Correlations					
		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	TOTAL_X4
X4.1	Pearson Correlation	1	.684**	.682**	.640**	.512**	.805**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X4.2	Pearson Correlation	.684**	1	.837**	.729**	.636**	.894**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X4.3	Pearson Correlation	.682**	.837**	1	.769**	.689**	.920**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X4.4	Pearson Correlation	.640**	.729**	.769**	1	.695**	.889**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X4.5	Pearson Correlation	.512**	.636**	.689**	.695**	1	.820**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
TOTAL_X4	Pearson Correlation	.805**	.894**	.920**	.889**	.820**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

6.5 Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak

		Correlations					
		X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	TOTAL_X5
X5.1	Pearson Correlation	1	.633**	.706**	.766**	.529**	.863**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X5.2	Pearson Correlation	.633**	1	.624**	.647**	.439**	.790**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X5.3	Pearson Correlation	.706**	.624**	1	.770**	.679**	.892**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X5.4	Pearson Correlation	.766**	.647**	.770**	1	.613**	.898**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X5.5	Pearson Correlation	.529**	.439**	.679**	.613**	1	.777**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
TOTAL_X5	Pearson Correlation	.863**	.790**	.892**	.898**	.777**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

6.6 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

		Correlations					
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	TOTAL_Y
Y1	Pearson Correlation	1	.841**	.808**	.825**	.663**	.900**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y2	Pearson Correlation	.841**	1	.829**	.818**	.792**	.931**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y3	Pearson Correlation	.808**	.829**	1	.893**	.835**	.948**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y4	Pearson Correlation	.825**	.818**	.893**	1	.775**	.934**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y5	Pearson Correlation	.663**	.792**	.835**	.775**	1	.886**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
TOTAL_Y	Pearson Correlation	.900**	.931**	.948**	.934**	.886**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 7. Hasil Uji Reabilitas

7.1 Hasil Uji Reabilitas Kesadaran Wajib Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.877	5

7.2 Hasil Uji Reabilitas Kualitas Pelayanan

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.921	5

7.3 Hasil Uji Reabilitas Penerapan E-Samsat

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.917	5

7.4 Hasil Uji Reabilitas Pengetahuan Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.916	5

7.5 Hasil Uji Reabilitas Sanksi Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.898	5

7.6 Hasil Uji Reabilitas Kepatuhan Wajib Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.953	5

Lampiran 8 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Standardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.97442031
Most Extreme Differences	Absolute	.103
	Positive	.103
	Negative	-.056
Kolmogorov-Smirnov Z		1.026
Asymp. Sig. (2-tailed)		.243

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Lampiran 9 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-.583	.476		-1.226	.223		
Kesadaran Wajib Pajak	.253	.099	.210	2.548	.012	.657	1.523
Kualitas Pelayanan	.207	.100	.185	2.068	.041	.556	1.799
E-Samsat	.130	.084	.108	1.551	.124	.924	1.082
Pengetahuan	.231	.104	.200	2.217	.029	.545	1.835
Sanksi Pajak	.444	.098	.377	4.546	.000	.647	1.545

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Lampiran 10 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.262	.522		.503	.616
Kesadaran Wajib Pajak	.204	.109	.229	1.878	.064
Kualitas Pelayanan	.104	.110	.126	.951	.344
E-Samsat	.145	.092	.161	1.575	.119
Pengetahuan	-.148	.115	-.172	-1.290	.200
Sanksi Pajak	-.155	.107	-.177	-1.447	.151

a. Dependent Variable: ABS_RES

Lampiran 11. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Sanksi Pajak, E-Samsat, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan ^b		Enter

- a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
 b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.763 ^a	.582	.559	.53905

- a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, E-Samsat, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan
 b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	37.952	5	7.590	26.122	.000 ^b
	Residual	27.314	94	.291		
	Total	65.266	99			

- a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
 b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, E-Samsat, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan

Lampiran 12 Hasil Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.583	.476		1.226	.223	
	Kesadaran Wajib Pajak	.253	.099	.210	2.548	.012	.657 1.523
	Kualitas Pelayanan	.207	.100	.185	2.068	.041	.556 1.799
	E-Samsat	.130	.084	.108	1.551	.124	.924 1.082
	Pengetahuan	.231	.104	.200	2.217	.029	.545 1.835
	Sanksi Pajak	.444	.098	.377	4.546	.000	.647 1.545

- a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak